

**DASAR PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA
NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012
(STUDI DI LAPAS KELAS II B MUARO SIJUNJUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SUCI HIDAYAH

NIM. 155010100111060



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 (STUDI
DI LAPAS KELAS II B MUARO SIJUNJUNG)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Suci Hidayah
b. NIM : 155010100111060

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 22 November 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP: 195901261987011002

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP: 195904061986012001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M
NIP: 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
(STUDI DI LAPAS KELAS II B MUARO SIJUNJUNG)**

**Oleh:
SUCI HIDAYAH
155010100111060**

Skripsi ini telah disahkan Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum
NIP: 195901261987011002

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP: 195904061986012001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yulianti, S.H., LL.M
NIP: 196607101992032003

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP: 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar keserjanaan dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi ini berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 (STUDI DI LAPAS KELAS II B MUARO SIJUNJUNG)”** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan petugas Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam hal pemberian remisi kepada narapidana narkotika.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, nasihat serta waktunya kepada penulis hingga akhir penulisan ini.

4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, nasihat serta waktunya kepada penulis hingga akhir penulisan ini.
5. Bapak Bistok Oloan Situngkir, A.Md.I.P., S.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung.
6. Bapak Mukdas selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang telah membantu dalam proses pengajuan surat izin penelitian penulis.
7. Bapak Sahlan, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang telah meluangkan waktunya serta dengan sabar membantu penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yuslinar, S.H selaku Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan telah meluangkan waktunya serta dengan sabar membantu penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung baik petugas, narapidana narkoba yang telah turut membantu penulis dalam penulisan ini.
10. Teristimewa teruntuk kedua orang tua penulis Bapak M.Yatim dan Ibu Yunisma yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tulus tiada tara kepada penulis.

11. Kakak satu-satunya Fajri Ilhami dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, arahan, serta doa kepada penulis.
12. Karina, Restu, Deola, Winnie, Agnes selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan doanya untuk kelancaran penelitian ini.
13. Syifa, Cici, Mia, Kadek, Devi, Dhanty, Fadly, Rara, Ika dan Aulia selaku keluarga penulis selama diperantauan ini, yang turut serta membantu dan mendoakan penulis.
14. Semua teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT Memberikan Balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan kritik guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN.....

i

HALAMAN PERSETUJUAN.....

ii

KATA PENGANTAR.....

iii

DAFTAR ISI.....

vi

DAFTAR TABEL.....

ix

DAFTAR GAMBAR.....

x

RINGKASAN.....

xi

SUMMARY.....

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

1

B. Rumusan Masalah.....

11

C. Tujuan.....

12

D. Manfaat.....

12

E. Sistematika Penulisan.....

13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara.....

15

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem

18

Pemasyarakatan.....

C. Tinjauan Umum tentang Remisi.....

26

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitan..... | 36 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| F. Populasi dan Sampel..... | 40 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 41 |
| H. Defenisi Operasional..... | 43 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambara Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| B. Realita Penghuni Lapas..... | 52 |
| C. Kriteria Bekerjasama di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung..... | 66 |
| D. Dasar Pertimbangan Pegawai Lapas Melaksanakan Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkotika..... | 78 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 90 |

| | |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |
|-----------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1. | Tabel Penelitian Terdahulu | 11 |
| Tabel 2. | Keadaan Lapas Berdasarkan Status..... | 52 |
| Tabel 3. | Jumlah Tahanan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung | 54 |
| Tabel 4. | Jumlah Narapidana Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung | 55 |
| Tabel 5. | Jumlah Penghuni Berdasarkan Kasus | 58 |
| Tabel 6. | Jumlah Narapidana Narkotika | 60 |
| Tabel 7. | Jumlah Narapidana Penerima Remisi 5 Tahun Terakhir | 61 |
| Tabel 8. | Jumlah Narapidana Narkotika Penerima Remisi Tahun 2015..... | 79 |
| Tabel 9. | Jumlah Narapidana Narkotika Penerima Remisi Tahun 2014..... | 80 |
| Tabel 10. | Jumlah Narapidana Narkotika Penerima Remisi Tahun 2016..... | 81 |
| Tabel 11. | Jumlah Narapidana Narkotika Penerima Remisi Tahun 2017..... | 82 |
| Tabel 12. | Jumlah Narapidana Narkotika Penerima Remisi Tahun 2018..... | 83 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung..... | 50 |
|---|----|



RINGKASAN

Suci Hidayah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, November 2018, Dasar Pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung). Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Diubahnya sistem “kepenjaraan” menjadi “pemasyarakatan” telah menjadi langkah awal diakuinya hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yang diatur dalam pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai remisi dimulai dari PP No. 32 tahun 1999, kemudian dirubah dalam PP No. 28 tahun 2006, dan dirubah kembali dalam PP No. 99 tahun 2012 yang memberikan syarat tambahan yaitu pernyataan bersedia bekerjasama untuk membongkar kejahatan yang dilakukan dalam bentuk tertulis. PP 99 tahun 2012 ditujukan untuk narapidana tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan petugas dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika.

Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara peraturan pemberian remisi dan pelaksanaan di lapangan. PP No. 99 tahun 2012 yang memberikan syarat tambahan untuk narapidana narkotika dengan tujuan untuk memberikan pengetatan dalam hal pemberian remisi. Namun pada kenyataan di lapangan yaitu di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, masih banyaknya jumlah narapidana narkotika mendapatkan remisi dengan mudah.

SUMMARY

Suci Hidayah, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, November 2018, Basic Consideration Over Giving Remission To Narcotics Convicts According To Government Regulation Number 99 Of 2012 (A study in The Department of Corrections Class II B Muaro Sijunjung). Advised by Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Eny Harjati, S.H., M.Hum.

The change of term from 'prison' to 'department of corrections' marks the beginning of the recognition of inmates' rights during their time spent in the department. It is commonly known that remission is one of their rights as regulated in Article 14 letter (i) of Act Number 12 of 1995 concerning Corrections. The regulation regarding remission started from Government Regulation Number 32 of 1999, amended to Government Regulation Number 28 of 2006, and further amended to Government Regulation Number 99 of 2012 which implies additional requirement in terms of assisting to reveal the crime one was once involved in a written form. The Government Regulation Number 99 of 2012 is addressed to those involved in narcotics-related crimes. This research is aimed to find out and analyse the basic consideration over the provision of remission to narcotic convicts.

The results of this study are that there are differences between the rules for giving remissions and implementation in the field. PP No. 99 of 2012 which provides additional conditions for narcotics prisoners with the aim of providing tightening in the case of remission. But in reality in the field, namely in Class II B Lapas Muaro Sijunjung, there are still a large number of narcotics prisoners getting remissions easily.



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas merupakan tempat untuk memberikan pembinaan kepada narapidana atau anak didik di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas, tempat tersebut dahulu lebih dikenal dengan sebutan Penjara. Namun, kata itu sudah tidak sesuai lagi pada masa sekarang karena penjara lebih mengutamakan pembalasan sedangkan pemasyarakatan lebih mengutamakan pembinaan yang diperlukan bagi narapidana atau anak didik setelah hukumannya dinyatakan selesai dan dapat kembali hidup secara normal dalam masyarakat.

Selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, setiap narapidana atau anak didik memiliki hak-hak yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal 14 tersebut dijelaskan bahwa terdapat 13 hak yang harus dilaksanakan oleh Lapas dengan berdasarkan pada status yang bersangkutan sebagai narapidana. Salah satu dari hak yang didapatkan setiap narapidana selama berada di Lapad adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan remisi. Hak tersebut diberikan setelah narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan.

Pada hakekatnya remisi merupakan hak seluruh narapidana tanpa membedakan tindak pidana yang dilakukan kecuali narapidana yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Remisi tersebut dapat diberikan apabila narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berkaitan dengan syarat-syarat pemberian hak pengurangan masa pidana atau remisi kepada narapidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Ada pun syarat pemberian remisi yaitu telah menjalani pidana paling singkat 6 bulan dan berkelakuan baik. Berkelakuan baik artinya narapidana yang bersangkutan tidak pernah melanggar peraturan-peraturan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi kepada 102.976 narapidana pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia.¹ Bahkan Sri Puguh Budi Utami selaku Direktur Jendral Pemasyarakatan menuturkan “bahwa dari 102.976 narapidana yang mendapatkan remisi, sebanyak 2.220 orang diantaranya langsung menghirup udara kebebasan, artinya sebanyak 100.756 orang tidak langsung bebas, dengan rincian 25.084 orang menerima remisi 1 bulan, 22.739 orang menerima remisi 2 bulan, 29.451 orang menerima

¹ Yoga Sukmana. 16 Agustus 2018. **HUT ke-73 RI, 102.976 Napi Dapat Remisi, 2.220 di Antaranya Bebas** <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/20304121/hut-ke-73-ri-102976-napi-dapat-remisi-2220-di-antaranya-bebas> (diaksen 16 Oktober 2018).

remisi 3 bulan, 14.170 orang menerima remisi 4 bulan, penerima remisi 5 bulan sebanyak 7.691 orang, dan 1.641 orang menerima remisi 6 bulan”.²

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga memberikan remisi khusus hari raya Idul Fitri pada tahun 2018 kepada 80.430 narapidana beragama Islam diseluruh Indonesia dan sebanyak 446 orang langsung dinyatakan bebas sedangkan 79.984 orang yang tersisa masih harus menjalani masa pidana setelah mendapatkan remisi.³ Kemudian Direktorat Jendral Pemasyarakatan merincikan Kantor Wilayah Kemenkumham terbanyak penerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2018 adalah Jawa Barat (8.654), Jawa Timur (61.9470), Sumatera Barat (6.228), Sumatera Utara (51.780), dan Kalimantan Timur (4.773).⁴

Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terjadi pengetatan syarat kepada narapidana narkoba, terorisme, korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya terkait syarat pemberian remisi. Narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa selain harus memenuhi syarat umum, juga harus memenuhi syarat khusus yang diatur dalam pasal 34A. Salah satu syarat khususnya yaitu harus bersedia bekerjasama dengan petugas untuk membongkar kejahatan yang dilakukan atau dikenal juga dengan *justice collaborator*.

² Yoga Sukmana. 16 Agustus 2018. **HUT ke-73 RI, 102.976 Napi Dapat Remisi, 2.220 di Antaranya Bebas** <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/20304121/hut-ke-73-ri-102976-napi-dapat-remisi-2220-di-antaranya-bebas> (diaksen 16 Oktober 2018)

³ Yandi Mohammad. 15 Juni 2018. **Remisi Lebaran untuk 80.430 Narapidana** <https://beritagar.id/artikel/berita/remisi-lebaran-untuk-80430-narapidana> (diakses 16 Oktober 2018)

⁴ Ibid.

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) M. Mahfud MD menegaskan bahwa pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lainnya melanggar asas *equality before the law* yaitu persamaan dihadapan hukum dan seharusnya peraturan tersebut dilakukan dengan payung hukum Undang-Undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP).⁵ Namun menurut penulis pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa memang seharusnya dilakukan. Terutama bagi tindak pidana Narkotika karena kondisi Indonesia saat ini sedang sangat terancam keselamatan generasi muda bangsanya yang disebabkan oleh obat berbahaya ini. Bahkan sekarang Indonesia sudah berada pada titik darurat narkoba.

Indonesia sebagai negara yang letaknya sangat strategis telah dijadikan sebagai tempat transit dan pemasaran narkoba dari negara lain. Bahkan sekarang Indonesia menjadi salah satu negara produsen narkoba di Dunia. Dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2005 dimana Mabes Polri membongkar PT Sumaco Jaya Abadi yang merupakan pabrik narkoba terbesar ketiga di Dunia yang terletak di Tangerang dengan ditemukannya 200 ton Ganja dan kemudian polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka mulai dari pemilik pabrik yang bernama Beny Suradjat, karyawan pabrik, hingga orang-orang yang terlibat dalam pembuatan narkoba tersebut.⁶ Kemudian sembilan dari sepuluh orang terdakwa dijatuhi hukuman mati, salah satunya pemilik pabrik yakni Beny Suradjat.

⁵ Deytri Robekka Aritonang, **batasi remisi dengan Undang-Undang** <http://www.kompas.com>, (20 Juli 2018).

⁶ Andi Saputra. 26 Februari 2016. Indonesia Darurat Sabu dan Pabrik Sabu Terbesar Ketiga di Dunia. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesar-ketiga-di-dunia/4> (diakses 29 Agustus 2018).

Namun hukuman tersebut tidak membuat Beny jera, selama berada didalam penjara, Beny tetap masih bisa mengendalikan pembangunan pabrik narkoba yang terletak di Pamulang, Cianjur dan Taman Sari pada tahun 2009-2010 dengan memanfaatkan dua orang anaknya sebagai kaki tangan.

Kasus lain pada tahun 2017 yakni terungkapnya salah satu diskotik yang dijadikan sebagai laboratorium atau semacam pabrik pembuat narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) melakukan penggerebekan didiskotik MG Club Internasional yang terletak dikawasan Jalan Tabagus Angke, Jakarta Barat Pada tanggal 17 Desember 2017 tepatnya pukul 02.30 WIB.⁷ Pada penggerebekan tersebut ditemukan prekursor atau bahan pembuat narkoba dan sebuah laboratorium yang mirip seperti pabrik pembuat narkoba yang terletak di lantai 4 diskotik.

Dari kasus-kasus tersebut sudah seharusnya Indonesia harus menganggap bahwa Narkoba merupakan masalah yang sangat serius karena narkoba merupakan obat yang berbahaya dan mematikan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh BNN terdapat lima keluhan yang banyak dialami oleh pengguna narkoba yaitu selera makan berkurang, rasa sesak didada, rasa lelah berkepanjangan, rasa mual berlebihan, dan rasa sakit pada hulu hati.⁸

⁷ Andry Haryanto. 17 Desember 2017. BNN Gerebek Pabrik Narkoba didiskotik Jakarta. Liputan 6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/3198668/bnn-gerebek-pabrik-narkoba-di-diskotek-jakarta-pemilik-diburu>. (diakses 29 Agustus 2018).

⁸ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, **Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017**,. Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2017, hal 22.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas pemberantasan narkoba di Gedung Bidakara, Jakarta pada tanggal 4 Februari 2015 menyatakan bahwa “Dalam setahun 18.000 orang yang meninggal akibat narkoba, coba bayangkan. Ini bukan angka kecil, sudah darurat. Semuanya harus bekerja sama karena kondisinya menurut saya sudah sangat darurat”.⁹ Data menyebutkan bahwa diperkirakan jumlah penyalagunaan narkoba sebanyak 3,8 sampai 4,1 juta jiwa atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan hampir 1 juta orang diantaranya telah menjadi pecandu.¹⁰

Kemudian berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 3.376.115 orang dengan rentan umur 10 sampai 59 tahun.¹¹ Apabila dilihat dari proporsi penyalahgunaan narkoba berdasarkan kelompok, yang menduduki persentasi tertinggi adalah pekerja dengan 59% atau sebanyak 1.991.909 orang, kemudian disusul pelajar 24% atau sebanyak 810.267 orang, dan 17% atau 573.939 orang adalah populasi umum.¹² Sedangkan dilihat dari proporsi berdasarkan jenis kelamin, Laki-laki menduduki angka persentasi tertinggi yakni sebanyak 72% atau

⁹ Indra Akuntano. 4 Februari 2015. **Preiden Joko Widodo: Indonesia Gawat Darurat Narkoba.** Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Indonesia.Gawat.Darurat.Narkoba> (diakses 29 Agustus 2018).

¹⁰ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, **Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017**,. Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2017, hal 24.

¹¹ Ibid., hal 28.

¹² Ibid., hal 29.

2.430.802 orang, sedangkan wanita berjumlah 945.312 orang atau 28%.¹³

Dari data-data yang didapatkan dari hasil survei BNN tahun 2017 tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah narkoba di Indonesia tidak pandang bulu, artinya siapa saja dimungkinkan dapat terkena masalah narkoba tanpa melihat umur, pekerjaan, atau pun jenis kelamin.

Namun disisi lain, pengetatan syarat-syarat pemberian remisi juga akan berdampak pada kesejahteraan warga binaan didalam lapas mengingat kondisi Lapas di Indonesia yang telah kelebihan kapasitas (*over capacity*). Data menyebutkan pada tahun 2018 Lapas diseluruh wilayah Indonesia berjumlah 250 dengan jumlah total tahanan dan narapidana sebanyak 247.894 orang, sedangkan kapasitas Lapas hanyalah 124.953 orang, ini berarti Lapas di Indonesia mengalami *over capacity* sebesar 123.241 orang.¹⁴ Dengan jumlah kelebihan sebanyak itu akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah seperti memicu keributan di dalam lapas, sulitnya pengawasan karena jumlah narapidana lebih banyak daripada jumlah pegawai, dan tidak maksimalnya program pembinaan bagi para napi. Masalah kelebihan kapasitas Lapas salah satunya bisa diselesaikan dengan pemberian remisi bagi narapidana narkoba karena lembaga pemasyarakatan di Indonesia 60% dihuni oleh narapidana narkoba dengan jumlah 106.000 orang.¹⁵

Walaupun telah dilakukan pengetatan syarat pemberian remisi kepada narapidana narkoba dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun

¹³ Ibid., hal 29.

¹⁴ Ditjen PAS, Sistem Database Pemasyarakatan (online) <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> , diakses 30 agustus 2018.

¹⁵ Ibid.

2012, namun pada kenyataannya peraturan itu belum berjalan secara maksimal karena masih banyak narapidana narkoba yang masih dengan mudah mendapatkan remisi. Berdasarkan prasurvei yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung di dapatkan data jumlah narapidana pertanggal 30 Juli 2018 sebanyak 290 orang dengan jumlah narapidana narkoba sebanyak 110 orang. Kemudian pada tahun 2017 yang mendapatkan remisi sebanyak 57 orang dari 105 narapidana narkoba dan pada tahun 2018 yang mendapatkan remisi sebanyak 60 orang dari 110 narapidana narkoba.¹⁶

Dari jumlah itu dapat kita lihat bahwa jumlah narapidana narkoba yang diberikan remisi terbilang cukup banyak yakni setengah dari jumlah keseluruhan. Jika dibandingkan dengan Lapas lain yang telah dilakukan penelitian terlebih dahulu misalnya di Lapas Lowokwaru Malang, jumlah narapidana narkoba yang diberikakan remisi pada tahun 2013 sebanyak 147 orang dari 497 narapidana narkoba.¹⁷ Kemudian pada Rutan Kelas II B Watansoppeng didapatkan hasil penelitian dari 2011-2016 jumlah narapidana narkoba yang mendapatkan remisi dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan setiap tahunnya narapidana narkoba yang mendapatkan remisi hanya berkisar 18-25 orang.¹⁸ Sehingga didapatkan kesimpulan awal bahwa pemberian remisi di Lapas Kelas II B Muaro

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sahlan S.H., Selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

¹⁷ Novan Ramkhamad P, **Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam Pp Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkoba (Studi Di Lapas Lowokwaru Malang)**, skripsi tidak diternitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁸ A. Uhartini, **Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Rumah Tahanan Klas Ii B Watansoppeng Tahun 2011-2016)**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Sijunjung masih belum ketat, dilihat dari jumlah narapidana narkoba yang mendapatkan remisi dan dibandingkan dengan lapas dan rutan yang lain di Indonesia.

Dari masalah tersebut, penulis tergugah untuk melakukan penelitian mengapa jumlah narapidana narkoba di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung masih tergolong banyak. Hal ini tentunya tidak adil bagi masyarakat luas yang berpendapat bahwa setiap narapidana narkoba masih dapat dengan mudah memperoleh pengurangan masa pidana, padahal narkoba dapat digolongkan kejahatan luar biasa yang mencemaskan masyarakat. Walaupun telah diberikan syarat-syarat khusus untuk memberikan pengetatan kepada setiap narapidana narkoba.

Kemudian salah satu yang menarik perhatian penulis bahwa lapas kelas II B Muaro Sijunjung ini yang terletak di salah satu kabupaten di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Sijunjung, yang mana mayoritas warganya beragama Islam dan Adat Minangkabau yang dianut pun harus berlandaskan pada syariat Islam. Seperti pepatah minang "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang minang haruslah berlandaskan pada Al-quran. Narkoba tentunya diharamkan didalam Al-quran karena dapat merusak tubuh, jiwa, dan sampai mematikan. Sehingga masyarakat Minang sendiri menganggap bahwa narkoba merupakan kejahatan yang mengesankan dan haruslah dituntaskan di Wilayah Sumatera Barat ini. Salah satunya dengan tidak memberikan pengurangan masa pidana (remisi) dengan mudahnya kepada narapidana narkoba. Hal tersebut untuk memberikan

efek jera agar narapidana yang bersangkutan dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi.

Tabel 1
Perbandingan skripsi dengan Skripsi Terdahulu

| No | Tahun Penelitian | Nama Peneliti dan Asal Instansi | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Keterangan |
|----|------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2012 | Agung Purwanto Universitas Negeri Islam Makassar | Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1a Makassar | 1. Bagaimana eksistensi pengaturan tentang remisi di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Apakah pengaturan tentang remisi sesuai dengan hukum pidana islam? | Bahasan mengenai analisis peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian remisi. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada dasar pertimbangan pelaksanaan dari peraturan perundangan-undangan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung. |
| 2 | 2014 | Marie Muhammad Universitas Hasanudin Makassar | Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Terhadap Narapidana(Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sunggumin asa) | 1. Bagaimana pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sunggumin asa ? 2. Faktor apa saja yang menghambat | Bahasannya mengenai proses pemenuhan hak yaitu remisi serta faktor penghambat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih meneliti terkait dasar pertimbangan pelaksanaan pemberian remisi serta peneliti |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | terlaksananya pemenuhan hak remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sungguminasa ? | juga mencari suatu alasan mengapa jumlah narapidana yang diberikan remisi bisa berjumlah banyak. |
|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas menerangkan bahwa terjadinya kontradiksi dimana peraturan mengenai pemberian remisi yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis ingin membahas permasalahan ini lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul: “Dasar Pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan(Studi Di Lapas Kelas Ii B Muaro Sijunjung)”

B Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria bersedia bekerjasama yang tertuang dalam pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai syarat khusus pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi terhadap narapidana narkoba di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung?

C Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang akan penulis capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menyimpulkan hal-hal yang menjadi kriteria bersedia bekerjasama yang menjadi syarat khusus yang diberikan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh petugas Lapas dalam pemberian pengurangan masa pidana atau remisi terhadap narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

D Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang dapat menjadikan skripsi ini menjadi referensi dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 14 huruf (i) mengenai pemberian remisi sebagai hak narapidana dan anak pidana khususnya terhadap narapidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

a. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pegawai Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih memahami terkait pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika dan menerapkannya.

b. Narapidana Narkotika

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman kepada narapidana narkotika berkaitan dengan syarat-syarat dan kriteria khusus yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hak pemberian remisi selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan penerangan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin marak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan berbagai pendapat yang tidak berdasar di kalangan masyarakat mengenai pemberian remisi terhadap narapidana narkotika.

E Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini akan dibagi menjadi 5 BAB. Kemudian dari bab-bab tersebut akan disusun secara sistematis. Adapun uraian singkat BAB tersebut sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi berbagai macam teori serta pendapat-pendapat ahli, yang sekiranya mendukung untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi mengenai cara-cara atau teknik yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini. Seperti jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi semua hasil dari penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yaitu berkaitan dengan kriteria-kriteria bekerjasama sebagai salah satu syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang diterapkan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dan dasar pertimbangan petugas dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba.

BAB V: PENUTUP

Merupakan kontribusi penulis dan merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta saran atas pembahasan dalam BAB IV yang berguna untuk perbaikan bagi penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

P.A.F Lamintang memberikan pendapat bahwa “pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut”.¹

Roslan Saleh mengemukakan bahwa “Pidana Penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana Penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu”. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa “Pidana penjara bukan hanya merampas kemerdekaan, tetapi akan menimbulkan juga akibat negatif yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri”. Akibat negatif yang dimaksud oleh Barda Nawawi itu adalah terampasnya kehidupan seksual sebagai manusia yang normal bagi narapidana, oleh sebab itulah sering terjadinya homoseksual dan

¹ Dwija Prayitno, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm 71.

masturbasi di kalangan narapidana. Bukan hanya itu akibat serius juga akan terasa bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Kemudian yang paling utama pidana penjara akan menimbulkan label atau cap jahat dari masyarakat walaupun pada kenyataan mantan narapidana tersebut sudah tidak melakukan kejahatan lagi.

2. Tujuan Pidana Penjara

Pidana Penjara memiliki tujuan antara lain adalah :²

- 1) Agar masyarakat menyadari hukum harus dipatuhi;
- 2) Agar orang lain tidak terpengaruh agar sifat jahat si pelaku;
- 3) Agar pelaku tidak melarikan diri;
- 4) Agar pelaku tidak merasa dimanjakan;
- 5) Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 6) Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien; dan
- 7) Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi atau terjawab.

3. Teori Pemidanan

Dalam hal pemidanan terdapat 3 (tiga) teori yang dapat digunakan, yaitu:

- 1) Teori absolut / Teori Pembalasan

Teori absolut atau yang dikenal dengan teori pembalasan dijatukan kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai akibat telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Andi Hamzah

² C.Djisman Samosir, **Sekulumit tentang Penologi & Pemasyarakatan**, Nuansa aulia, 2012, hlm 59

berpendapat bahwa “teori absolut atau pembalasan tidak bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan itu mengandung unsur dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana ada karena suatu kejahatan dan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”³

Berkaitan dengan teori pembalasan Muladi dan Barda Nawawi juga berpendapat bahwa “Pidana ada karena akibat mutlak dari adanya pembalasan dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pembenaran dari pidana itu karena adanya kejahatan itu sendiri.”⁴

Jadi teori pembalasan tidak memikirkan manfaat dijatuhkannya suatu pidana kepada seseorang, melainkan teori ini hanya untuk balas dendam dan tidak memikirkan nilai kemanusiaan sehingga teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik.

2) Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut sebelumnya. Teori relatif atau teori tujuan adalah dasar pemberian pemidanaan untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pada teori ini pejatuhan pidana kepada pelaku mempunyai tujuan tertentu yaitu memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan atau mengulangi perbuatannya yang melanggar peraturan. Menurut Van Hamel tujuan pidana yaitu untuk

³ Yesmil Anwar dan Adang, **Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 133

⁴ Ibid., hlm. 134.

mempertahankan ketertiban masyarakat, selain itu juga bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, sehingga pada akhirnya kejahatan tersebut dapat dibinasakan.⁵ Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a) Mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b) Menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c) Memperbaiki pelaku kejahatan.
- d) Memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kejahatan.⁶

Jadi menurut teori ini, untuk mencegah ketertiban masyarakat agar tidak terganggu, sehingga taraf efektifitas dari hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3) Teori Gabungan

Pada teori gabungan ini tujuan pidana yaitu untuk membalas kesalahan pelaku dan juga untuk melindungi masyarakat agar terciptanya tujuan hukum yaitu ketertiban, kemanfaatan, keadilan. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang menjadi dasar pemidanaan. Teori ini lahir karena adanya kelemahan di teori-teori sebelumnya. sehingga untuk melengkapi kelemahan tersebut, dibentuklah teori ini.

B Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

⁵ Ibid., hlm 137.

⁶ Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 66.

Sistem pemidanaan di Indonesia pada awalnya adalah sistem kepenjaraan yang mengutamakan pembalasan terhadap narapidana. Namun semenjak tanggal 27 April 1964 sistem tersebut diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang memfokuskan pada pembinaan dan upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan.⁷ Alasan perubahasan sistem pemidanaan di Indonesia adalah sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan prinsip NKRI dilihat dari perlakuan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih menekankan pada pembalasan, sedangkan sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih menekankan pada pembinaan. Tujuannya bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana saja, melainkan diharapkan pelaku tindak pidana dapat menyadari dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan dapat kembali dalam tatanan hidup bermasyarakat setelah hukumannya dinyatakan selesai.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa⁸:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁷ Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto. **Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan**, Jurnal Perspektif, Volume XX No. 2, 2015, hlm 23.

⁸ Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 2.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

1. Tahapan-tahapan Pembinaan

Secara umum pentahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembinaan. Ada pun tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Tahap pertama atau awal (*maximum security*)

Merupakan tahapan permulaan dalam pembinaan di Lapas. Pada tahap ini, narapidana mendapatkan pengamanan *maximum security* yaitu penjagaan yang sangat ketat. Tahap ini dimulai semenjak narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai sepertiga masa pidana sebenarnya. Masa Pidana yang sebenarnya adalah masa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dan dikurangi dengan masa penahanan selama proses peradilan.

Selanjutnya pada tahap ini, terdapat satu masa yang disebut dengan admisi dan orientasi, yaitu terhitung sejak narapidana masuk paling lama 14 hari. Masa admisi dan orientasi adalah waktu untuk menyelesaikan administrasi dan orientasi.

Diharapkan pada masa transisi ini, narapidana dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga dapat hidup secara normal didalam Lapas. Kemudian data yang diperoleh

pada masa ini diperlukan untuk pertimbangan pembinaan selanjutnya.

Selanjutnya Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melaksanakan sidang untuk dievaluasi kemudian mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan peningkatan pembinaan bagi narapidana yang telah menjalani sepertiga masa pidananya.

b. Tahap kedua (*medium security*)

Pada tahap ini, sistem pengamanan lebih longgar dibandingkan pada tahap pertama atau disebut juga dengan *medium security*.

Pada tahap ini dimulai dari sepertiga sampai dengan setengah masa pidana yang sebenarnya. Untuk kepentingan pembinaan, maka narapidana akan didata terkait minat dan bakatnya serta tingkat pendidikan yang pernah ditempuh. Ada pun bentuk-bentuk pembinaan pada tahap ini seperti pembinaan kepribadian (mental dan spritual) dan pembinaan kemandirian.

Sama halnya dengan tahap pertama, pada tahap kedua ini menjelang tenggang waktu pembinaan berakhir maka akan dilakukan evaluasi kembali melalui sidang oleh TPP. Apabila evaluasi pada tahap ini baik, maka program pembinaan bagi narapidana akan ditingkatkan pada tahap tiga. Namun sebaliknya, jika tidak ada perubahan atau dapat dikatakan gagal, maka program pembinaan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Tahap ketiga (*minimum security*)

Pada tahap ini, narapidana telah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Tenggang waktu yang diberikan adalah antara setengah masa pidana hingga dua pertiga masa sebenarnya. Tahap ini disebut juga dengan tahap asimilasi, yang mana narapidana sudah mulai dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan pengawasan ringan atau *minimum security*. Tahap Asimilasi ini dapat dilakukan didalam Lapas atau narapidana pidana yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas terbuka (*open camp*). Ada pun bentuk pembinaan pada tahap ketiga ini adalah berupa beribadah bersama, kerja bakti, bekerja di unit-unit keterampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dan sebagainya.

d. Tahap keempat (*integrasi*)

Tahap ini disebut juga dengan tahap integrasi, dimana narapidana diterjunkan langsung dalam kehidupan pemasyarakatan tanpa pengawasan. Salah satu syarat agar narapidana berada pada tahap ini adalah telah menjalani sekurang-kurangnya masa pidana selama sembilan bulan.

Kemudian Balai Pemasyarakatan melakukan bimbingan pada narapidana dan pengawasannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sesuai dengan domisili narapidana yang bersangkutan.

Ada pun bentuk integrasi yang diberikan seperti cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.

2. Hak-hak Narapidana

Narapidana adalah orang yang tegah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak boleh ada pembedaan atau diskriminasi baik itu berdasarkan ras, warna kulit, bahasa, agama, pendirian politik dan lainnya, asal kebangsaan, atau sosial, kekayaan, kelahiran atau statusnya lainnya.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Walaupun Lapas berarti menghilangkan kemerdekaan narapidana, bukan berarti hak-hak dari narapidana tidak diakui. Hal itu disebabkan karena sistem pemasyarakatan Indonesia menganut asas *aquisatoir* yang menempatkan narapidana sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu yang harus diakui dan dilaksanakan. Pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, pasal 14 menegaskan setiap narapidana dan anak pidana mempunyai hak-hak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun hak-hak warga binaan sebagai berikut:¹¹

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

⁹ Natas George Bulu, **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (emb) terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kab. Tanah Toraja**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makkasar, 2013, hlm 14.

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Ibid, pasal 14

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupu jasmani.
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. menyampaikan keluhan, yaitu apabila terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang terjadi pada masa pembinaan, baik itu oleh sesama penghuni ataupun aparat Lapas.¹²
- f. meperoleh bahan bacaan dan diperkenankan untuk mengikuti siaran media massa;
- g. mendapatkan upah atau presmi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. berhak dikunjungi keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. memperoleh pengurangan masa pidana (remisi), yang diberikan setelah narapidana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.¹³
- j. mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, sama halnya dengan pemberian remisi, hak berasimilasi juga dapat diberikan apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁴
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.¹⁵
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas, yaitu diberikan apabila narapidana yang bersangkutan telah menjalani lebih dari dua periga

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 huruf e.

¹³ Ibid, pasal 14 huruf i

¹⁴ Ibid, pasal 14 huruf j

¹⁵ Ibid, pasal 14 huruf k

masa pidananya dengan syarat harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi berakhir paling lama 6 bulan.¹⁶

- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti hak politik, hak memilih, dan hak-hak keperdataan lainnya.¹⁷

Hak-hak yang telah dijelaskan di atas, haruslah dijalankan. Dalam artian setiap Lapas di Indonesia harus menjamin bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang sedang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan hak-haknya tanpa kurang satu pun. Dalam melaksanakan hak-hak narapidana tersebut, tentunya Lembaga Pemasyarakatan haruslah berpedoman pada peraturan-perundangan, karena setiap tindakan yang dilakukan haruslah berdasarkan pada hukum. Ada pun dasar hukum dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 huruf l.

¹⁷ Ibid, pasal 14 huruf m.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

C Tinjauan Umum Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Salah satu hak narapidana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pada pasal 14 huruf (i), menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan remisi. Hak tersebut diberikan setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.¹⁸

Menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu bentuk motivasi untuk membina diri bagi narapidana agar kelak dapat diterima kembali dalam tatanan hidup bermasyarakat.¹⁹ Kemudian dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi secara rinci, namun hanya menyebutkan²⁰:

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

¹⁸ Penjelasan Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang nomor 12 tahun 1995.

¹⁹ Ibid., hlm 143.

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi, Pasal 1.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa remisi adalah salah satu hak warga binaan yang diberikan oleh negara sebagai salah satu bentuk *reward* atas perilaku selama di lembaga pemasyarakatan. Kemudian remisi dijadikan sebagai bentuk motivasi bagi narapidana untuk tetap berperilaku baik sehingga mampu kembali kemasyarakat dengan reintegrasi yang baik.

Terkait pelaksanaan hak narapidana, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan.” Remisi di atur di dalam pasal 34 yang berisikan tentang syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana. Pasal 34 tentang Remisi telah mengalami 2 kali perubahan yakni pada tahun 2006 dan tahun 2012. Adapun perubahan syarat pemberian remisi sebagai berikut:

| | |
|--|---|
| Pasal 34 PP No. 32 Tahun 1999 | (1) Setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi (2) Remisi tersebut dapat ditambah apabila: a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara / kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas. |
| PP No. 28 Tahun 2006 sebagai Perubahan Pertama atas PP No. 32 Tahun 1999 | (1) Narapidana berhak mendapatkan remisi. (2) Remisi diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Berkelakuan baik; b. Telah menjalani masa minimal 6 bulan. |

| | |
|---|--|
| | <p>(3) Narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, dan kejahatan kemanusiaan yang berat, dan kejahatan transnasional juga harus memenuhi syarat seperti berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya.</p> |
| <p>PP No. 99 Tahun 2012 sebagai Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999</p> | <p>Pasal 34</p> <p>(1) Narapidana berhak mendapatkan Remisi.</p> <p>(2) Syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berkelakuan baik; Telah menjalani pidana paling singkat 6 bulan. <p>(3) Persyaratan berkelakuan baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam tenggang waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi diberikan dan telah mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dan mendapatkan predikat baik.</p> |
| | <p>Pasal 34A</p> <p>(1) Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan kemanusiaan, kejahatan hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional selain harus memenuhi persyaratan umum, juga harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan; Untuk tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan; Untuk tindak pidana terorisme telah mengikuti program deradikalisme yang diselenggarakan oleh lapas. <p>(2) Untuk narapidana narkoba dan prekursor narkoba dan psikotropika hanya berlaku bagi narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.</p> <p>(3) Persyaratan pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis.</p> |

Kemudian syarat dan tata cara pemberian remisi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 yang diatur dalam BAB II dengan pasal-pasal berikut:²¹

Pasal 7

“Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lapas; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.”²²

Pasal 9

“Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”²³

Pasal 12

“khusus untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asai manusia berat, serta kejahatan transnasional yaitu surat keterangan bersedia bekerjasama yang berguna untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya ditetapkan oleh instansi penegak hukum terkait; fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lapas; salinan buku register F; salinan daftar perubahan dari

²¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

²² ibid, **Pasal 7**

²³ ibid, **Pasal 9**

Kepala Lapas; laporan perkembangan pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.”²⁴

2. Jenis-Jenis Remisi

Didasarkan pada Keputusan Presiden Tentang Remisi No. 174 Tahun 1999 tepatnya pada pasal 2, disebutkan mengenai jenis-jenis remisi yang diberikan kepada narapidana terdiri atas:

1) Remisi umum.

Diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Besarnya remisi umum adalah:

- a. bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 s/d 12 bulan akan mendapatkan remisi 1 bulan; dan
- b. bagi narapidana yang telah menjalani pidana lebih dari 12 bulan atau lebih akan mendapatkan remisi sebesar 2 bulan.

Kemudian pelaksanaan pemberian remisi umum sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sesuai dengan penjelasan sebelumnya.
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan;
- d. tahun keempat dan kelima diberikan remisi 5 bulan; dan
- e. tahun keenam hingga selanjutnya diberikan remisi 6 bulan.

²⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, **Pasal 12.**

2) Remisi khusus.

Diberikan pada hari raya besar keagamaan sesuai dengan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Besarnya remisi khusus sebagai berikut:

- a. tahun pertama diberikan remisi 15 hari untuk masa menjalani pidana selama 6 s/d 12 bulan, sedangkan untuk masa pidana menjalani lebih dari 12 bulan akan mendapatkan remisi 1 bulan;
- b. tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 bulan;
- c. tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 bulan 15 hari; dan
- d. tahun keenam hingga selanjutnya akan diberikan 2 bulan tiap tahunnya.

3) Remisi tambahan.

Diberikan apabila narapidana yang bersangkutan:

- berbuat jasa untuk negara;
- melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk negara atau kemanusiaan; atau
- melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas.²⁵

²⁵

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan, apabila berjasa untuk negara atau kemanusiaan; dan
- b. memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum, apabila telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan.

3. Tata Cara Pemberian Remisi

Pemberian remisi kepada narapidana dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor wilayah, dengan Direktorat Jendral.²⁶ Berkaitan dengan tata cara pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2018. Ada pun tata cara pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan narapidana dan anak piadana yang telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan pemberian remisi kepada Kepala Lapas.
- b. Setelah disetujui oleh Kepala Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

²⁶ Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 16.

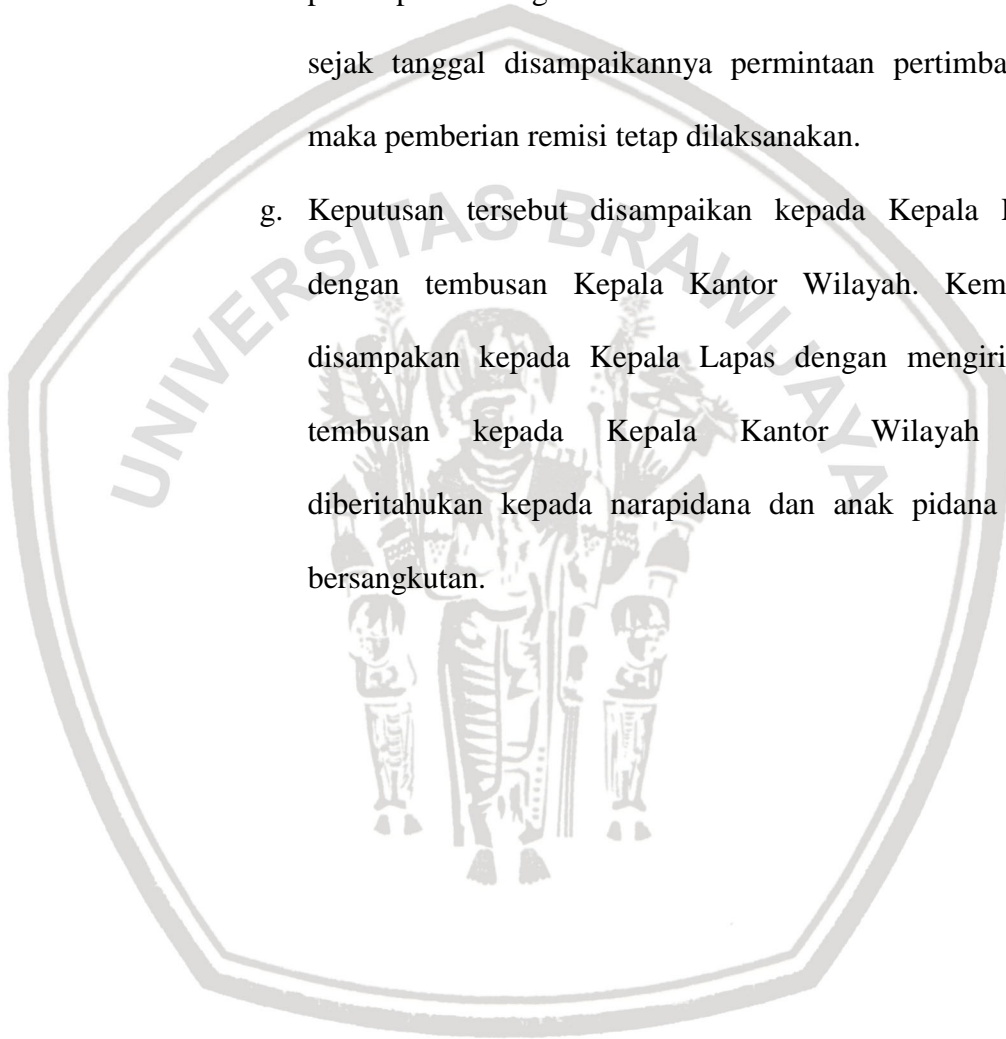
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jendral.
- d. Direktur Jendral melakukan verifikasi paling lama 3 hari sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal perlu dilakukan perbaikan, maka Direktur Jendral mengembalikan usulan remisi kepada Kepala Lapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari Kepala Lapas wajib memperbaiki usulan pemberian remisi dan kemudian menyampaikan kembali kepada Direktur Jendral dengan mengirimkan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- e. Dalam hal Direktur Jendral menyetujui usul pemberian remisian, maka Direktur Jendra atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian remisi. Kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas dengan mengirimkan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, kemudian Kepala Lapas memberitahukan kepada narapidana yang memperoleh remisi.

Tatacara pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum berbeda dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Pekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, dan Kejahatan terhadap keamanan negara lainnya serta

kejahatan transnasional lainnya. Ada pun tata cara pemberian remisinya sebagai berikut

- a. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan narapidana dan anak piadana yang telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan pemberian remisi kepada Kepala Lapas.
- b. Setelah disetujui oleh Kepala Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas dan kemudian menyampaikannya kepada Direktur Jendral.
- d. Direktur Jendral melakukan verifikasi paling lama 15 hari sejak tanggal usulan diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal perlu dilakukan perbaikan, maka Direktur Jendral mengembalikan usulan remisi kepada Kepala Lapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari Kepala Lapas wajib memperbaiki usulan pemberian remisi dan kemudian menyampaikan kembali kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

- e. Dalam hal Direktur Jendral menyetujui usul pemberian remisian, Direktur Jendral mengirimkan usul pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
- f. Keputusan pemberian remisi ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri atau pemimpin lembaga terkait. Jika dalam 12 hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan, maka pemberian remisi tetap dilaksanakan.
- g. Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Lapas dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah. Kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas dengan mengirimkan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah agar diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan studi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba serta mendalami pertimbangan pegawai Lapas dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.² Pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui dasar

¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 201.

² Soerjono Soekanto, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal 51

pertimbangan petugas Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam hal pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika.

C Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena pada hasil prasurvei yang penulis lakukan, penulis menemukan sebuah masalah yakni terjadinya kontradiksi dari PP 99 tahun 2012 berkaitan dengan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Berdasarkan hasil pra survei, didapatkan data bahwa sebanyak 34 orang pada tahun 2017 dari 78 narapidana narkotika dan tahun 2018 sebanyak 39 orang mendapatkan pengurangan masa pidana dari jumlah total narapidana narkotika sebanyak 72 orang.³ Oleh karena itu penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sijunjung untuk dijadikan lokasi penelitian agar mengetahui pertimbangan pegawai lapas dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapida narkotika yang masih tergolong cukup banyak.

D Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan

³ Hasil prasurvei di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, pada tanggal 30 Juli 2018

responden secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴ Data primer dalam penelitian ini juga termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma sebagai pelengkap data dari sumber data primer.⁵ Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, data remisi dari Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, form *justicia collaborator* (bekerjasama) sebagai salah satu syarat bagi narapidana narkoba untuk mendapatkan remisi, data kepegawaian, serta data gambaran umum tentang Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

E Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah:
- 1) Wawancara langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁶

⁴ Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Alfabeta, Bandung, hal 65.

⁵ Ibid, hal 68.

⁶ Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, hal 82.

Penulis akan melakukan wawancara secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sijunjung khususnya bagian Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik dan kegiatan kerja lembaga pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung serta beberapa narapidana narkoba terkait pemenuhan hak pengurangan masa pidana. Dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian ini.

2) Observasi langsung yaitu dengan mengamati dengan teliti segala hal yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung selama 3 (tiga) minggu.

b. Data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah:

1) Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁷

Hal ini dilakukan untuk menunjang data primer yang berkaitan

⁷

Sudarto, **Metodologi Penelitian Filsafat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 71.

dengan dasar pertimbangan pemeberian remisi di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung.

F Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.⁸ Ada pun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai Lapas Sijunjung dan seluruh narapidana di Lapas Sijunjung.
- b. Sampel adalah contoh dari populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel dianggap sebagai wakil dari populasi tersebut.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampel yaitu dimana penulis menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat diharapkan mampu menjawab permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Lapas Kelas II B Sijunjung bagian Binadik dan Giatja (Bimbingan Narapidana atau Anak Pidana dan Kegiatan Kerja) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dan narapidana narkoba yang pernah mendapatkan remisi.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum**, Pensil Komunika, Jakarta, 2007, hlm 122.

⁹ Ibid., hlm 125.

c. Responden

- 1) Sahlan, S.H (Kepala Seksi Bindik dan Giatja)
- 2) Yulinar, S.H (Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan)
- 3) Narapidana narkoba yang pernah mendapatkan remisi sebanyak 3 orang.

G Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan cara kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini sangat penting karena kadang kala pada saat penelitian, data yang diperoleh belum memenuhi harapan penulis, oleh karena itu data-data tersebut harus di edit terlebih dahulu sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.

¹⁰

Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas yariah**, hal 48

2) *Calssifing*

Data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan daam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan agar penelitian ini lebih sistematis.

3) *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.¹¹

Jadi tahap ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yag telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah direkam ketika wawancara berlangsung. Kemudian untuk sebagian data penulis memverifikasikannya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan subjek yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4) *Analisis data*

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola dan kategori sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan

¹¹ Lexy J. Moloeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal 104.

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, yaitu dengan mengorganisasikan data dan memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, sehingga menemukan apa yang penting untuk diceritakan kembali.¹² Jadi, penulis akan menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

5) Kesimpulan

Merupakan hasil suatu proses penelitian. Kesimpulan merupakan langkah terakhir, dimana penulis akan menyimpulkan dari data yang telah dianalisis sebelumnya untuk menyempurnakan penelitian dan kemudian menuliskan kesimpulan tersebut pada bab V.

H Defenisi Operasional

1. Remisi atau pengurangan masa pidana adalah salah satu hak narapidana dan anak pidana yang pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹² Lexy J. Moloeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal hal 248

2. Narapidana adalah terpidana atau seseorang yang tengah berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan atas tindak pidana yang ia lakukan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung didirikan pada tahun 1979 dan mulai dioperasikan pada tahun 1983. Terletak di Jalan Pengayoman Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas tanah 166.675 meter persegi dan luas bangunan 9.134 meter persegi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Depatemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Ada pun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung yaitu:

VISI

- a. Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Didasarkan pada pemahaman bahwa aktifitas yang dilakukan oleh Lapas adalah dalam rangka mengembalikan warga binaan menjadi individu yang bertaqwa, mampu berinteraksi secara sehat dalam mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik.

MISI

- a. Menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap tahanan.
- b. Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dengan standar pemasyarakatan berbasis IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat (perlibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Ada pun tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan Narapidana atau Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial, kerohanian kepada Narapidana atau Anak Didik; dan
4. Melakukan urusan tata usaha dan kerumahtanggan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung terdiri dari 5 blok yang dibedakan berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, yaitu:

1. Blok A.

Pada blok ini ditempatkan narapidana dengan 2 jenis tindak pidana. Pertama, bagi narapidana dengan jenis tindak pidana khusus yaitu terdiri dari tindak pidana korupsi, narkoba baik

itu bandar maupun pengguna, terorisme, illegal logging, human trafficking, pencucian uang, dan genosida. Jumlah sel atau kamar untuk narapidana tindak pidana khusus sebanyak 6 sel yaitu sel 1,2,3,4,5, dan 6.

Kedua, narapidana dengan jenis kejahatan umum atau kriminal seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya. Jumlah sel yang diperuntukkan untuk tindak pidana umum juga sebanyak 6 sel atau kamar yaitu sel 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.

2. Blok B

Blok ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki status sebagai tahanan. Yaitu mereka yang masih dalam tahap peradilan, dalam artiannya belum diputus oleh hakim. Tahanan disini yaitu tahanan polisi, tahanan jaksa, tahanan Pengadilan Negeri, tahanan Pengadilan Tinggi, dan tahanan Mahkamah Agung. Blok khusus tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung terdiri dari 6 sel atau kamar yaitu sel 13, 13A, 14, 15, 16, dan 17

3. Blok C

Blok ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Strapsel. Disebut juga sel hukuman, sel ini dihuni oleh narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas seperti perkelahian, mencuri, dan melakukan hal-hal yang membahayakan baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Didalam strapsel, narapidana akan dijaga dengan *maxium*

security bahkan jika perbuatannya termasuk dalam golongan yang berbahaya seperti melakukan upaya kabur, maka narapidana tersebut akan dibelenggu baik itu tangan maupun kakinya. Jangka waktu narapidana didalam strapsel adalah 1 minggu, kemudian dilihat perkembangannya. Jika ada perubahan perilaku, maka narapidana yang bersangkutan akan dikembalikan atau dipindahkan ke sel yang seharusnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun sebaliknya, jika narapidana tersebut tidak menunjukkan perubahan, maka masa hukuman disana akan diperpanjang 1 minggu lagi dan begitu seterusnya. Sel Strapsel terdiri dari 2 kamar.

- b. Mapenaling. Sel ini diperuntukan untuk narapidana yang baru masuk dan narapidana yang baru dipindahkan dari Lapas lain. Sel ini juga dijaga dengan *maxium security*. Jangka waktu narapidana didalam sel mapenaling ini adalah 1 minggu. Di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung, sel mapenaling terdiri atas 3 kamar.

Seharusnya kedua sel ini harus dipisahkan, namun karena keterbatasan tempat, maka di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung dijadikan satu saja karena keduanya memang perlu dijaga dengan tingkatan ketat atau *maxium security*.¹

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mukdas selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, hari Senin 24 September 2018.

4. Blok Melati

Blok ini dikhususkan untuk narapidana lanjut usia dan narapidana khusus seperti polisi dan tentara. Mengapa polisi atau tentara dipisahkan dengan narapidana lainnya, alasannya adalah untuk menghindari keributan antara narapidana kriminal umum dengan polisi atau tentara, karena seperti yang kita tahu bahwa narapidana dan polisi tentunya bertentangan. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan bahwa antara narapidana biasa dengan polisi atau tentara harus dipisahkan. Seharusnya dilakukan sama antara narapidana biasa dengan polisi ataupun tentara, namun pada prakteknya tidak bisa disatukan dengan narapidana tindak pidana kriminal lainnya, karena akan terjadi keributan seperti perkelahian diantara mereka.²

Kemudian blok ini juga ditempatkan untuk narapidana yang dipekerjaan seperti di dapur. Hal ini sebagai bentuk perlakuan khusus karena narapidana yang bersangkutan telah bersedia membantu petugas. Blok melati ini terdiri dari 2 kamar atau sel.

5. Blok Mawar

Blok ini hanya terdiri dari 1 sel atau kamar yaitu sel khusus wanita. Walaupun seharusnya setiap narapidana wanita ditempatkan di Lapas khusus wanita, namun jika tindak pidana yang dilakukan dan putusan yang jatuhkan termasuk ringan maka narapidana wanita itu bisa dibina di Lembaga Pemasyarakatan

² Hasil wawancara dengan Bapak Mukdas selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, hari Senin 24 September 2018.

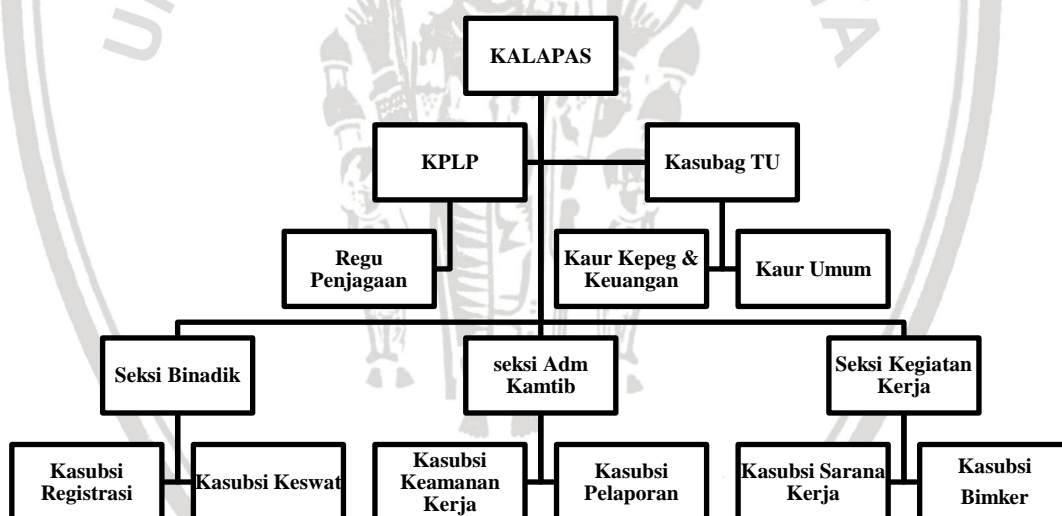
umum seperti Lapas Muaro Sijunjung. Sekarang ini di Lapas Muaro Sijunjung hanya ada 1 (satu) orang narapidana wanita dengan tindak pidana penipuan yang diputus pidana selama 1 tahun, itu pun sudah akan diajukan cuti menjelang bebas.³

Selanjutnya untuk narapidana anak, tidak ada sel khusus yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung. Karena keterbatasan tempat, sehingga narapidana anak disamakan saja dengan narapidana dewasa.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Gambar. 1

Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung



³ Hasil wawancara dengan Bapak Mukdas selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung, hari Senin 24 September 2018.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Muaro Sijunjung memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebanyak 51 orang dengan rincian total Sumber Daya Manusia Pria berjumlah 45 orang dan total Sumber Daya Manusia wanita berjumlah 6 orang. Tingkat pendidikan rata-rata SDM Lapas adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu sebanyak 40 orang. Dengan uraian sebagai berikut:⁴

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan : 1 orang
2. Sub Bagian Tata Usaha : 6 orang
3. Seksi Pembinaan/Giatja : 4 orang
4. Seksi Administrasi Kamtib : 7 orang
5. Kesatuan Pengamanan : 33 orang

Dari uraian diatas, maka akan dijabarkan berdasarkan jabatan yang dibuat dalam struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung sebagai berikut:⁵

1. Bistok Oloan Situngkir, : Kepala Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung
A.Md.I.P., S.H.
2. Sahlan, S.H : Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
dan Kegiatan Kerja
3. Yuslinar, S.H : Kasubsi Registrasi
4. M. Nurdin Efendi, S.H : Kepala KPLP
5. Yuhemi, S.H : Kaur Kepeg/Keuangan

⁴ Data Manajemen Registrasi kepegawaian tahun 2018 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

⁵ Data Manajemen Registrasi kepegawaian Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

6. Mukdas : Kepala Subbag Tata Usaha
7. Rusja Hendri : Kepala Subsidi Kegiatan Kerja
8. Junahar : Kepala Subsidi Perawatan Napi/Anak Didik
9. Wirdam : Kepala Subsidi Pelaporan dan Tata Tetib
Lapas
10. Yusnedi : Kepala Subsidi Keamanan
11. Fakruddin Can : Kepala Urusan Umum

B Realitas Penghuni Lapas

Jumlah narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung per tanggal 25 September 2018 berjumlah 216 orang dan tahanan sebanyak 74 orang. Jadi total narapidana dan tahanan berjumlah 290 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2

Keadaan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung berdasarkan status

| Jumlah WBP | Berdasarkan Jenis Kelamin | | Tahanan | | | Narapidana | | | Kapasi- tas | % Over |
|---------------|---------------------------------|---|---------|---|---|------------|---|---|----------------|-----------|
| | L | P | L | P | A | L | P | A | | |
| 290 | 289 | 1 | 73 | - | 1 | 214 | 1 | 1 | 150 | 140 |

Sumber: Data Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung per 25 September 2018.

Keterangan:

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan.

L : Laki-Laki

P : Perempuan

A : Anak

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung yang dihuni dengan 290 warga binaan mengalami kelebihan kapasitas atau disebut juga *over capacity* sebanyak 93 orang, karena kapasitas atau daya tampung lapas sebenarnya hanyalah 150 orang. Kemudian dalam tabel diatas juga dapat dilihat bahwa warga binaan wanita hanya berjumlah 1 (satu) orang, artinya sebagian besar Lapas dihuni oleh warga binaan berjenis kelamin laki-laki.

Berkaitan dengan warga binaan wanita yang hanya berjumlah 1 orang di dalam Lapas, maka warga binaan wanita tersebut ditempatkan di blok khusus wanita yaitu blok Mawar. Walaupun ditempatkan di blok khusus, menurut penulis dengan besarnya ketimpangan jumlah yakni 1 : 289 orang, sangat banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi, salah satunya kemungkinan terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga binaan laki-laki kepada warga binaan perempuan tersebut. Karena sama-sama kita ketahui kurungan penjara atau pidana berarti menghilangkan kemerdekaan si narapidana tersebut. Hilangnya kemerdekaan ini salah satunya yang paling dirasakan adalah hilangnya hubungan heteroseksual. Bukan hanya itu, berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian lapang, penulis mengamati bahwa narapidana wanita ini lebih banyak berada di dalam sel, bahkan untuk

dipekerjakan di dapur saja tidak diperbolehkan. Hal itu untuk menghindari kemungkinan yang telah penulis ungkapan. Sehingga proses pembinaan terhadap narapidana wanita tersebut tentunya tidak efektif. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadi kemungkinan buruk, seharusnya narapidana wanita yang hanya berjumlah 1 (satu) orang di Lapas Muaro Sijunjung dipindahkan ke Lapas Khusus wanita.

Seperti yang diterangkan dalam tabel di atas bahwa Lapas Muaro Sijunjung tidak hanya diperuntukkan untuk narapidana saja, akan tetapi juga terdapat tahanan didalamnya. Ada pun jumlah tahanan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Tahanan Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung Per September 2018

| No | Golongan | Tahanan | | | | Jumlah |
|--------|----------|-----------|------|--------|------|--------|
| | | Laki-Laki | | Wanita | | |
| | | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | |
| 1 | A I | 8 | - | - | - | 8 |
| 2 | A II | 16 | - | - | - | 16 |
| 3 | A III | 45 | 1 | - | - | 46 |
| 4 | A IV | 4 | - | - | - | 4 |
| 5 | A V | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | 73 | 1 | - | - | 74 |

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung per tanggal 25 September 2018.

Keterangan :

AI = Tahanan Polisi.

AII = Tahanan Kejaksaan.

- AIII = Tahanan Pengadilan Negeri.
AIV = Tahanan Pengadilan Tinggi.
AV = Tahanan Mahkamah Agung.

Dari tabel di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung sebanyak 74 orang. Jika dilihat dari jumlah warga binaan pada tahun 2018 seluruhnya yaitu berjumlah sebanyak 290 orang, berarti $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari warga binaan adalah tahanan. Dari seluruh jumlah tahanan tersebut, yang menduduki jumlah terbanyak adalah tahanan Pengadilan Negeri yaitu sebanyak 46 orang yang terdiri dari 45 orang dewasa dan 1 orang anak-anak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung tidak memiliki blok khusus untuk anak-anak, sehingga 1 orang anak tahanan pengadilan ini ditempatkan di Blok A yaitu blok kriminal umum. Artinya tahanan anak ini dicampurkan dengan warga binaan dewasa.

Setelah mengetahui jumlah tahanan yang ada dalam Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, selanjutnya penulis akan memberikan penjelasan berkaitan dengan jumlah narapidana yang ada dalam Lapas, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4

Jumlah Narapidana Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung Tahun 2018

| No | Golongan | Tahanan | | | | Jumlah |
|--------|----------|-----------|------|--------|------|--------|
| | | Laki-Laki | | Wanita | | |
| | | Dewasa | Anak | Dewasa | Anak | |
| 1 | BI | 192 | 1 | - | - | 193 |
| 2 | BIIa | 13 | - | 1 | - | 14 |
| 3 | BIIb | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | BIII | 8 | - | - | - | 8 |
| Jumlah | | 214 | 1 | 1 | - | 216 |

Sumber: Data Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung per 25 September 2018.

Keterangan :

BI : Narapidana yang dipidana 1 tahun ke atas.

BIIa : Narapidana yang dipidana 1 tahun kebawah – 3 bulan.

BIIb : Narapidana yang dipidana 3 bulan kebawah.

BIII : Narapidana yang dipidana denda atau subsider kurungan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah narapidana di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung sebanyak 216 orang dari jumlah total warga binaan sebanyak 290 orang. Dari jumlah tersebut, narapidana yang dijatuhi putusan pidana diatas 1 tahun menduduki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 193 orang, dengan uraian 192 orang dewasa dan 1 orang anak-anak, kemudian 13 orang yang dipidana 1 tahun kebawah sampai dengan 3 bulan, 8 orang yang dipidana dibawah 3 bulan, dan narapidana yang dipidana denda atau subsider kurungan hanya 1 (satu) orang. Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait penempatan

tahanan anak, bagi narapidana anak di Lapas Muaro Sijunjung penempatannya juga dicampurkan dengan narapidana dewasa.

Alasan pencampuran warga binaan anak dengan warga binaan dewasa adalah karena keterbatasan tempat.⁶ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Lapas Muaro Sijunjung ini telah mengalami kelebihan kapastias yang seharusnya yakni sebanyak 193 orang, oleh sebab itulah anak baik itu tahanan maupun narapidana disatukan dengan dewasa. Selanjutnya bapak mukdas juga menyampaikan bahwa Lapas ini tidak ada blok khusus untuk anak, karena seharusnya anak ditempatkan di Lapas khusus anak yang terletak di Tanjung Patih, Payakumbuh yang jaraknya kurang lebih 98,8 km atau sekitar 2 jam 48 menit perjalanan.⁷ Oleh karena itu maka untuk kasus anak yang terbilang ringan akan ditempatkan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, mengingat cukup jauhnya jarak jika keluarga ingin mnegunjungi anak.

Berkaitan dengan penempatan anak baik itu tahanan ataupun narapidana di Lapas Muaro Sijunjung yang disatukan dengan warga binaan dewasa, menurut penulis itu akan memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut. Jika dihubungkan dengan tujuan dari pembinaan yaitu agar memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi perbuatan pidana, maka tujuan dari pembedaan tersebut tidak akan

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukdas Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, Hari Senin 24 September 2018

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukdas Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, Hari Senin 24 September 2018

berjalan efektif. Ada pun dampak yang dapat ditimbulkan bagi anak pidana jika disatukan dengan warga binaan dewasa adalah:

1. Anak tidak akan mendapatkan pembinaan secara khusus, yang seharusnya didapatkan anak selama masa pembinaan. Seperti halnya apabila anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak.
2. Dengan bergaulnya anak dengan narapidana dewasa lainnya, maka pengetahuan anak tentunya akan bertambah. Pengetahuan disini adalah pengetahuan terkait kejahatan karena di Lapas Umum tentunya diisi oleh orang-orang yang melakukan berbagai macam tindak pidana. Sehingga dimungkinkan setelah menyelesaikan masa pidananya, anak yang bersangkutan bisa melakukan tindak pidana lain sesuai dengan yang ia dapatkan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Narapidana maupun tahanan di Lapas Muaro Sijunjung terdiri dari berbagai macam kasus atau tindak pidana. Mulai dari tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan, dan lain-lain hingga tindak pidana khusus seperti narkoba, korupsi, illegal logging, dan lain sebagainya. Untuk itu tabel dibawah ini akan menggolongkan jumlah warga binaan Lapas berdasarkan pada kasus atau tindak pidana yang dilakukan.

Tabel 5
Keadaan penghuni Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung
berdasarkan kasus per September 2018

| Jumlah WBP | Jumlah Pidana Khusus | | | | | | | | Jumlah Pidana Umun |
|---------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|
| | NKB | NKP | KOR | TER | LOG | TRA | PCU | GNS | |
| 290 | 84 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |

Sumber: Data Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung per 25 September 2018.

Keterangan:

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan.

NKB : Narkoba Bandar/Pengedar.

NKP : Narkoba Pengguna.

KOR : Korupsi.

TER : Teroris.

LOG : Illegal Logging.

TRA : Human Trafficking.

PCU : Pencucian Uang.

GNS : Genosida.

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah warga binaan tindak pidana khusus berjumlah 114 orang. Artinya jumlah pidana umum sebanyak 176 orang. Kemudian dilihat pada tabel bahwa tidak semua tindak pidana khusus ada di Lapas Muaro Sijunjung, melainkan hanya terdapat 3 kasus tindak pidana khusus di Lapas Muaro Sijunjung yaitu Narkoba, Illegal Logging, dan Korupsi. Berdasarkan data di atas, jumlah tertinggi didapatkan pada tindak pidana narkoba yakni sebanyak 110 orang dengan uraian 84 orang merupakan Bandar atau Pengedar dan 26 orang merupakan pengguna, apabila dipersentasikan sebanyak 39,3%. Kemudian tindak pidana illegal logging sebanyak 3 orang, dan tindak

pidana korupsi berjumlah 1 orang. Jadi, disimpulkan bahwa sebagian Lapas Muaro Sijunjung dihuni oleh narapidana narkoba.

Berhubungan dengan tindak pidana khusus, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian terkait pemberian remisi kepada narapidana narkoba, oleh karena itu untuk selanjutnya penulis akan menerangkan jumlah narapidana narkoba di Lapas Muaro Sijunjung 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 6
Jumlah Narapidana Narkoba Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

| Tahun | NKB | NKP | Total |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 2014 | 31 | 16 | 47 |
| 2015 | 54 | 16 | 70 |
| 2016 | 40 | 64 | 104 |
| 2017 | 80 | 25 | 105 |
| 2018 | 84 | 26 | 110 |

Sumber: data Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Keterangan:

NKB = Narkoba Bandar

NKP = Narkoba Pengguna.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2014 sampai dengan 2018 jumlah narapidana narkoba di Lapas Muaro Sijunjung tiap tahunnya mengalami kenaikan jumlah. Kenaikan jumlah yang signifikan terjadi pada tahun 2016 yaitu dari 70 orang menjadi 104 orang, artinya jumlah narapidana yang bertambah pada tahun itu sebanyak 34 orang. Berdasarkan data terakhir yakni pada tahun 2018

dapat dilihat bahwa narapidana narkotika yang berada di Lapas B Muaro Sijunjung berjumlah 110 orang narapidana dan sebagian besar merupakan bandar atau pengedar yakni sebanyak 84 orang jika dibandingkan dengan narapidana pengguna sebanyak 26 orang.

Setelah mengetahui jumlah narapidana baik itu narapidana tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, selanjutnya kita beralih ke pemberian remisi. Dimana semua narapidana berhak mendapatkan remisi apabila memenuhi syarat. Secara umum berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai jumlah narapidana yang pernah mendapatkan remisi 5 tahun terakhir di Lapas Muaro Sijunjung yaitu:

Tabel 7
Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi 5 tahun terakhir
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung

| Jenis Remisi | Jumlah Penerima Remisi Per Tahun | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Remisi Umum I (RU I) | 89 | 152 | 110 | 64 | 113 |
| Remisi Umum II (RU II) | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Remisi Khusus I (RK I) | | | | | |
| • Islam | 5 | 56 | 67 | 37 | 51 |
| • Kritten | - | - | - | - | - |
| • Hindu | - | - | - | - | - |
| • Budha | - | - | - | - | - |
| Remisi Khusus II (RK II) | - | - | - | - | - |
| Remisi Tambahan | - | - | - | - | - |
| Jumlah Total | 95 | 208 | 179 | 102 | 166 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Keterangan :

- Remisi Umum I : Remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia, namun narapidana yang bersangkutan masih harus menjalani sisa hukumannya.
- Remisi Umum II : Remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan, namun narapidana yang bersangkutan langsung dinyatakan bebas dari hukumannya.
- Remisi Khusus I : Remisi yang diberikan pada hari raya besar keagamaan, namun narapidana yang bersangkutan masih harus menjalani sisa hukumannya.
- Remisi Khusus II : Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan, namun yang bersangkutan langsung dinyatakan bebas dari hukumannya.
- Remisi Tambahan : Remisi yang diberikan kepada warga binaan Lapas yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk negara, dan melakukan kegiatan yang membantu kegiatan pembinaan.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung pada tahun 2014 memberikaan remisi umum yakni pada tanggal 17 Agustus 2014 kepada 90 orang narapidana dan anak pidana dan 1 (satu) diantaranya langsung dinyatakan bebas. Kemudian Lapas Muaro Sijunjung juga memberikan remisi khusus yakni pada Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 28 Juli 2014 kepada 5 orang narapidana dan anak pidana. Jika diperhatikan dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemberian remisi umum. Kemudian berdasarkan tabel tersebut bahwa di Lapas kelas II B Muaro Sijunjung pada tahun 2014 hanya memberikan 2 jenis remisi kepada narapidana, yaitu remisi umum dan remisi khusus sedangkan untuk remisi tambahan tidak ada satupun dari narapidana yang mendapatkannya.

Pada tahun 2015 Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung memberikan remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2015 kepada 152 narapidana, dan tidak ada satu pun dari narapidana tersebut yang langsung dinyatakan bebas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2014 yang hanya berjumlah 90 orang, maka dapat dikatakan jumlah tahun 2015 mengalami kenaikan. Kemudian untuk remisi khusus diberikan kepada 56 narapidana pada Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada tanggal 17 Juli 2015. Sedangkan untuk remisi tambahan, sama seperti tahun sebelumnya tidak ada satupun narapidana yang diberikan remisi tambahan.

Pada tahun 2016 jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yakni pada tahun 2016 Lapas Muaro Sijunjung memberikan remisi umum kepada total 112 orang, dengan uraian 2 orang langsung dinyatakan bebas dan 110 orang masih harus menjalani sisa masa pidananya. Remisi Umum ini diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016. Kemudian untuk remisi khusus pada tahun 2016 diberikan kepada 67 orang narapidana pada tanggal 6 Juli 2016 yang bertepatan dengan Hari raya Idul Fitri.

Pada tahun 2017, dilihat dari tabel jumlah narapidana yang diberikan remisi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya baik itu remisi umum maupun remisi khusus. Lapas Muaro Sijunjung pada tanggal 17 Agustus 2017 memberikan remisi umum dengan jumlah total kepada 65 orang narapidana, dan 1 diantaranya dinyatakan langsung bebas sedangkan sisanya yaitu 64 orang masih harus menjalani sisa masa pidananya. Kemudian 37 orang narapidana yang beragama Islam diberikan

remisi oleh Lapas Muaro Sijunjung pada Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 24 Juni 2017. Dari jumlah tersebut terlihat di tabel bahwa tidak ada narapidana yang dinyatakan langsung bebas. Ini artinya 37 orang narapidana yang menerima remisi khusus pada Idul Fitri masih tetap harus menjalani masa pidananya.

Kemudian pada tahun 2018, Lapas Muaro Sijunjung memberikan Remisi Umum dengan jumlah total kepada 135 orang narapidana. Jika diuraikan yakni sebanyak 2 orang narapidana mendapatkan Remisi Umum II yang artinya narapidana yang bersangkutan langsung dinyatakan bebas, dan sebanyak 133 orang narapidana mendapatkan Remisi Umum I yang artinya narapidana tersebut harus tetap berada di Lapas untuk menjalani sisa masa pidananya. Terkait pemberian remisi khusus, Lapas Muaro Sijunjung memberikan remisi khusus kepada 51 orang narapidana pada tanggal 14 Juni 2018 dan tidak ada yang mendapatkan remisi khusus II. Artinya 51 orang narapidana tersebut masih harus menjalani sisa masa pidananya didalam Lapas. Kemudian dilihat dari perbandingan jumlah antara tahun sebelumnya yakni tahun 2017, pada tahun 2018 narapidana yang diberikan remisi baik itu remisi umum dan remisi khusus mengalami kenaikan.

Dari tabel-tabel diatas yang menerangkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lapas Muaro Sijunjung 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa jumlah pemberian remisi di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah total penerima remisi tiap tahunnya, baik itu

remisi umum maupun remisi khusus. Jika dilihat dari jumlah total dalam tabel, didapatkan bahwa jumlah terbesar penerima remisi adalah pada tahun 2015 yaitu sebanyak 208 orang narapidana. Jumlah ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 95 orang. Kemudian jumlah penerima pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan yakni dengan jumlah penerima remisi sebanyak 179, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah pemberian remisi kepada 102 orang narapidana. Terakhir pada tahun 2018, mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu jumlah penerima remisi sebanyak 166 orang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima remisi terbesar yaitu pada tahun 2015 dan jumlah penerima remisi terkecil ada tahun 2014.

Kemudian untuk jenis remisi yang diberikan, terlihat dari data dalam tabel bahwa hanya ada 2 jenis remisi yang didapatkan oleh narapidana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Lapas Muaro Sijunjung. Ada pun jenis remisi tersebut adalah Remisi Umum yang diberikan ada hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang jatuh pada tanggal 17 Agustus dan remisi khusus yang diberikan pada hari raya besar keagamaan berdasarkan dengan agama yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan. Sedangkan untuk remisi tambahan tidak pernah ada diberikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kepada narapidana. Berkaitan dengan jenis remisi tersebut, Bu Yuslinar selaku Kepala Sub Seksi Registrasi mengutarakan,

“bahwa selama ini memang di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung tidak pernah ada narapidana yang mendapatkan remisi tambahan, karena seperti yang diketahui bahwa remisi tambahan adalah apabila narapidana yang bersangkutan melakukan hal-hal tertentu seperti berjasa untuk negara, membantu kegiatan lapas, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu, di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung tidak pernah ada narapidana yang berbuat seperti syarat yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itulah Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung hanya memberikan 2 jenis remisi yaitu remisi umum dan remisi khusus.”⁸

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa terkait remisi khusus, 5 tahun terakhir ini hanya diberikan pada hari Raya Idul Fitri saja karena memang mayoritas narapidana yang menghuni Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung beragama Islam “hanya satu orang yang kristen, selebihnya Islam”, tuturnya.⁹

C Kriteria Bekerjasama di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung Sebagai Salah Satu Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Narkotika

Pemberian remisi adalah hak setiap narapidana yang diatur dalam pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 tahun 1995. Remisi didapatkan bukan lewat permintaan akan tetapi melalui usulan. Remisi diusulkan oleh petugas Lapas apabila narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan syarat-syarat pemberian remisi. Syarat pemberian Remisi diatur dalam Pasal 34 PP Nomor 99 tahun 2012. Dalam pasal 34 terdapat 2

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yuslinar, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi, pada tanggal 28 September 2018

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Yuslinar, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung, pada tanggal 28 September 2018.

syarat umum yang harus dipenuhi oleh seluruh narapidana yaitu berkelakuan baik dan harus telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan. Sedangkan untuk tindak pidana khusus salah satunya narkoba diberikan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana narkoba yang tertuang dalam pasal 34A yaitu harus membuat surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan. Surat pernyataan itu harus ditanda tangani oleh narapidana narkoba yang bersangkutan.

Menurut Kepala Seksi Binadik dan Giatja yaitu Bapak Sahlan, dalam hal syarat-syarat pemberian remisi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), mengingat telah terjadi dua kali perubahan pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang syarat-syarat pemberian remisi. Adapun golongan syarat-syarat tersebut adalah:¹⁰

1. Narapidana Narkoba yang dijatuhi hukuman pidana penjara sebelum tahun 2012.

Untuk narapidana narkoba tersebut akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, maka syarat pemberian remisi untuk narapidana narkoba tersebut adalah

- Berkelakuan baik; dan
- Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.

2. Narapidana narkoba yang dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2012 sampai seterusnya.

¹⁰

Hasil wawancara dengan bapak Sahlan, selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja

Untuk narapidana narkotika tersebut akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Namun tidak semua narapidana narotika yang dijatuhi putusan pada tahun 2012 ke atas dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Melainkan hanya narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun saja. Ada pun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Berkelakuan baik;
 - Telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan; dan
 - Membuat surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan.
3. Narapidana narkotika yang dijatuhi hukuman pada tahun 2012 dan seterusnya, dan dipidana kurang dari 5 tahun.

Untuk narapidana narkotika tersebut akan dikenakan Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2006, karena walaupun narapidana narkotika tersebut dijatuhi hukuman pada tahun 2012 tapi, hukuman pidana yang dijatuhi tidak sampai 5 tahun. Sedangkan narapidana narkotika yang mendapatkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, hanya berlaku bagi narapidana narkotika yang dijatuhi hukuman paling singkat 5 tahun.¹¹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sahlan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat pemberian remisi kepada narapidana

¹¹

Pasal 34A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

narkotika dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu syarat umum dan syarat khusus:

1. Syarat Umum

- a. Berkelakuan baik, yaitu harus mentaati semua peraturan yang ada di Lapas dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin yang dibuktikan dengan buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi yaitu dalam rentang waktu 6 bulan terakhir yang terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Buku Register F adalah catatan pelanggaran tata tertib setiap narapidana di dalam Lapas. Kemudian narapidana yang bersangkutan harus telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.¹²
- b. Telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan. Artinya narapidana narkotika yang berhak untuk diusulkan remisi adalah narapidana narkotika yang telah menjalani masa pidananya 6 bulan, terhitung dari tanggal surat penahanan pertama yang diberikan oleh kepolisian.¹³

2. Syarat Khusus

- a. Membuat surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan atau disebut juga *justice collaboratore*

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Sahlan, S.H, selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja, tanggal 28 September 2018

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahlan, S.H, selaku Kepala Seksi Binadik dan Giatja, tanggal 28 september 2018

Berkaitan dengan syarat tambahan untuk narapidana narkoba diatur dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pernyataan bersedia bekerjasama dibuat secara tertulis oleh petugas Lapas dan ditanda tangani diatas materai oleh narapidana narkoba yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan tersebut haruslah ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara, berkaitan dengan surat pernyataan bekerjasama sebagai syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana narkoba, Lapas Muaro Sijunjung tidak memiliki kriteria khusus dalam penerapannya. Dasar dari pelaksanaan pemenuhan syarat tambahan pemberian remisi bagi narapidana narkoba hanyalah berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yaitu PP 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang syarat dan Tata cara pemberian remisi No. 03 tahun 2018, dan Keputusan Presiden tentang Remisi No. 174 tahun 1999.

Walaupun tidak ada kriteria khusus terkait surat pernyataan bekerjasama di Lapas Muaro Sijunjung, namun Ibu Yuslinar selaku Kepala Sub Seksi Registrasi berpendapat bahwa yang dikatakan bekerjasama itu adalah narapidana tindak pidana narkoba yang

bersangkutan bersedia untuk memberikan informasi, mengungkap orang-orang serta induk dari organisasi narkoba yang ia lakukan, dan bersedia untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁴

Ada pun tata cara pemenuhan surat pernyataan bekerjasama di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung sebagai berikut¹⁵:

- 1) Melakukan pendekatan terlebih dahulu, dimulai dari memberikan sosialisasi setiap seminggu sekali bahwa pernyataan bekerjasama ini merupakan salah satu syarat pemberian remisi bagi narapidana khusus salah satunya tindak pidana narkoba.
- 2) Apabila narapidana narkoba yang bersangkutan telah memenuhi syarat umum, maka Kepala Sub Seksi Registrasi akan meminta tanda tangan diatas materai kepada narapidana narkoba yang akan diusulkan pemberian remisi.
- 3) Kemudian usulan tersebut akan disampaikan ke Kejaksaan untuk meminta surat keterangan sebagai *justice collaborator*.
- 4) Setelah keterangan *justice collaboratore* diterima oleh pihak Lapas, barulah Remisi dapat diusulkan sesuai dengan prosedur yang tertera Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi No. 03 Tahun 2018 tepatnya dalam pasal 22 s/d pasal 27.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Yuslinar, Kepala Sub Seksi Registrasi, pada tanggal 27 September 2018

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Yuslinar, Kepala Sub Seksi Registrasi, pada tanggal 27 September 2018

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa surat pernyataan bekerjasama yang menjadi salah satu syarat bagi narapidana narkoba untuk dapat diusulkan remisi haruslah dikeluarkan oleh Kejaksaan. Namun apabila pihak kejaksaan tidak mengeluarkan keterangan *justice collaborator*, bukan berarti narapidana narkoba yang bersangkutan tidak mendapatkan usulan remisi. Bagi narapidana yang tidak mendapatkan keterangan *justice collaborator* dari kejaksaan, maka untuk narapidana narkoba yang hukumannya 5 (lima) tahun keatas akan mendapatkan usulan remisi apabila telah menjalani 1/3 dari 5 (tahun) yaitu sekitar 1 tahun 6 bulan dan diusulkan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya narapidana narkoba yang mendapatkan keterangan *justice collaborator* dari Kejaksaan, cukup dengan minimal telah menjalani pidana selama 6 bulan. Sedangkan bagi narapidana narkoba yang hukumannya dibawah 5 (lima) tahun untuk diusulkan remisi hanya harus memenuhi syarat umum yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani pidana dengan minimal 6 bulan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pernyataan bersedia bekerjasama ini merupakan syarat tambahan untuk narapidana tindak pidana khusus salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Tujuannya adalah memberikan pengetatan terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Namun, selain untuk memberikan pengetatan, tentunya peraturan yang tertuang dalam pasal 34A PP Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mempunyai tujuan lanjutan yaitu mempermudah aparat penegak hukum dalam hal

membongkar suatu kasus seperti narkoba. Karena tentunya tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang tidak bisa dijalankan sendirian melainkan mereka memiliki suatu organisasi atau kelompok. Sehingga diharapkan dengan adanya syarat tambahan yaitu pernyataan bersedia bekerjasama ini, pelaku tindak pidana mau untuk bekerjasama dengan petugas untuk memberikan informasi tentang organisasinya dengan imbalan tentunya diberikan usulan remisi.

Berkaitan dengan implementasi dari syarat tambahan tersebut, di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dapat dikatakan tidak ada. Penulis mengatakan demikian karena pada saat melakukan wawancara, penulis sempat menanyakan hal tersebut kepada Bapak Sahlan S.H, selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Muaro Sijunjung. Dimana beliau menuturkan bahwa surat pernyataan bekerjasama hanyalah sebuah persyaratan saja, dalam artian hanya dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh narapidana narkoba yang akan diusulkan remisi. Namun implementasi dari surat pernyataan itu sama sekali tidak ada. Alasannya karena seharusnya surat pernyataan bekerjasama itu dibuat pada awal proses pemeriksaan seperti penyidikan dan pada saat yang bersangkutan masih dalam status tahanan bukan pada saat yang bersangkutan telah berstatus narapidana yang artinya putusan pidana penjara telah dijatuhkan kepadanya”.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sahlan, S.H, Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik, 1 Oktober 2018

Kemudian Ibu Lina menambahkan bahwa kasus narkoba ini sudah pasti ada organisasinya, untuk itu sangat diperlukan surat pernyataan bekerjasama ini, tapi peletakkannya tidak efektif jika dijadikan syarat untuk remisi karena apabila surat pernyataan bekerjasama dilakukan pada saat status yang bersangkutan masih tahanan, diharapkan pernyataan bersedia bekerjasama tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mengurangi putusan.¹⁷ Namun apabila setelah menjadi narapidana, maka perbuatan tersebut tidak akan berpengaruh lagi karena putusan telah dijatuhkan.

Jika dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Pak Sahlan dan Bu Lina, penulis memahami bahwasanya menjadikan surat pernyataan bekerjasama sebagai salah satu syarat tambahan untuk narapidana narkoba yang dijatuhi hukuman diatas 5 (tahun) kurang efektif. Hal itu karena implementasi atau hasil yang diharapkan dari surat pernyataan itu di Lapas Muaro Sijunjung tidak ada sama sekali. Jadi, pernyataan tersebut hanyalah sebuah syarat.

Berdasarkan uraian sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Sahlan S.H, terkait pelaksanaan surat pernyataan bekerjasama, penulis berpendapat bahwa memang seharusnya dilakukan pada saat awal pemeriksaan sehingga dimungkinkan untuk membongkar kasus tersebut secara keseluruhan dan juga memberikan sebuah reward seperti pertimbangan untuk mengurangi putusan hukuman yang diberikan bagi

¹⁷
2018

Hasil Wawancara dengan Ibu Yuslinar, selaku Kepala Sub Seksi Registrasi, 1 Oktober

narapidana narkoba yang telah bersedia untuk memberikan informasi dan membongkar jaringan tindak pidana narkoba yang berhubungan dengan dirinya. Sebaliknya, disisi lain sebenarnya narapidana narkoba tetap diberikan reward apabila bersedia untuk bekerjasama dengan aparat hukum untuk membongkar tindak pidana narkoba yang dilakukannya, bentuk rewardnya adalah pengurangan masa pidana (remisi). Namun tentunya reward berupa remisi ini tidak memberikan keuntungan bagi aparat hukum jika dilihat dari fakta dilapangan karena itu merupakan syarat saja, tidak pernah ada tindak pidana narkoba yang terbongkar sampai ke akarnya di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Apabila dilakukan pada saat proses peradilan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan, tentunya pelaku tindak pidana dijadikan saksi di persidangan dan memberikan informasi langsung yang berguna untuk membongkar kasus narkoba yang dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan bersedia bekerjasama kurang efektif untuk dijadikan syarat pengetatan narapidana narkoba mendapatkan remisi, karena keuntungan yang didapatkan hanyalah kepada si narapidana yang bersangkutan. Sedangkan untuk negara, untuk petugas, aparat hukum tidak ada sama sekali. Bahkan tindak pidana narkoba masih bebas melakukan aksinya diluar sana.

Selain melakukan wawancara dengan petugas di bidang Binadik, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang narapidana yang pernah mendapatkan remisi baik itu remisi umum dan remisi khusus, diantaranya:

1. Nama : Iskandar Muhammad Pgl. Ijal
Usia : 35 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang
Hukuman : 14 tahun
Jumlah Remisi : 12 bulan 15 hari

2. Nama : Persaulian Pgl. Ucok
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Hukuman : 7 tahun
Jumlah Remisi : 4 bulan

3. Nama : Agustinar
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Swasta
Hukuman : 6 tahun
Jumlah remisi : 1 bulan.

Ada pun hasil wawancara yang penulis peroleh dari wawancara dengan ketiga narapidana narkoba yang disebutkan di atas adalah :¹⁸

1. Bahwa mereka telah pernah mendapatkan remisi umum dan remisi khusus.
2. Berhubungan dengan tahun masuk, ketiga narapidana tersebut masuk setelah tahun 2012, artinya mereka dikenakan Peraturan

¹⁸

Hasil wawancara dengan 3 orang narapidana narkoba, 2 oktober 2018

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 yang memberikan syarat tambahan yaitu pernyataan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus yang dilakukan.

3. Ketiga narapidana tersebut mengetahui semua syarat-syaratnya baik itu syarat umum dan syarat tambahan untuk tindak pidana narkotika.
4. Kemudian berkaitan dengan implementasi dari syarat tambahan berupa pernyataan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum, mereka memang menandatangani surat pernyataan bekerjasama tersebut, tapi cuma sekedar itu saja. Alasan mereka menandatangani karena itu merupakan syarat pengusulan remisi “jika kami tidak tanda tangan maka kami tidak akan mendapatkan remisi” sebut mereka. Berkaitan dengan implementasi, ternyata selama ini mereka tidak pernah dilakukan wawancara selama berada di Lapas terkait dengan pernyataan bekerjasama itu. Baik itu dari pihak kepolisian, jaksa, atau aparat penegak hukum lainnya.

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pernyataan tertulis bersedia bekerjasama yang harus ditandatangani oleh narapidana narkotika dalam hal pelaksanaannya di lapangan kurang efektif bahkan bisa dikatakan tidak berhasil. Khususnya di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

D Dasar Pertimbangan Pegawai Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung Melaksanan Pemberian Remisi kepada Narapidana Narkotika

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengurangan masa pidana (remisi) bisa digolongkan dalam beberapa jenis seperti:

1. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia yang diperingati pada tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari raya keagamaan sesuai dengan keyakinan dari narapidana yang bersangkutan. Jika terdapat beberapa hari raya dan satu keyakinan atau agama, maka yang diambil adalah hari raya yang paling besar dan paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Remisi Tambahan, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukakn perbuatan yang bermanfaat untuk negara ataupun kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung didapatkan data penerima remisi khususnya untuk narapidana narkotika 5 tahun terakhir yaitu:

Tabel 8
**Jumlah Narapidana Narkotika yang Menerima Remisi Tahun
2014 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung**

| Jumlah Narapidana Narkotika | Besarnya Remisi Umum | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | |
| 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

| | Besarnya Remisi Khusus | | | | Jumlah |
|--------------|------------------------|-------|-------------|-------|-----------|
| | 15 hr | 1 bln | 1 bln 15 hr | 2 bln | |
| | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | | | | | 19 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 untuk penerima remisi umum sebanyak 11 orang dengan besar remisi yang didapatkan 1 bulan untuk 10 orang dan 1 orang mendapatkan remisi umum sebesar 2 bulan. Kesimpulannya bahwa pada tahun 2014 narapidana narkoba yang mendapatkan remisi umum paling banyak sebesar 1 bulan. Selanjutnya, untuk penerima remisi khusus pada tahun 2014 diberikan kepada 8 orang, yang dapat diuraikan 7 orang mendapatkan remisi khusus 15 hari dan 1 orang mendapatkan remisi khusus 1 bulan. Kemudian dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penerima remisi khusus pada tahun 2014 paling banyak sebesar 15 hari. Sehingga dari jumlah-jumlah penerima remisi umum dan remisi khusus pada tahun 2014 dapat ditotalkan sebanyak 19 orang dan perolehan paling banyak didapatkan oleh penerima remisi umum yaitu sebanyak 11 orang.

Jadi, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan total penerima remisi sebanyak 19 orang narapidana narkoba, menurut penulis masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah narapidana narkoba yaitu sebanyak 47 orang. Alasannya karena jumlah penerima remisi tidak sampai setengah dari jumlah narapidana narkoba yang ada. Hal ini berarti, PP 99 Tahun 2012 yang bertujuan untuk memperketat pemberian remisi bagi tindak pidana khusus salah satunya

narkotika di Lapas Muaro Sijunjung pada tahun 2014 telah efektif dijalankan.

Tabel 9
Jumlah Narapidana Narkotika yang Menerima Remisi Tahun 2015 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

| Jumlah Narapidana Narkotika | Besarnya Remisi Umum | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | |
| 70 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | Besarnya Remisi Khusus | | | | | | Jumlah |
| | 15 hr | 1 bln | 1 bln 15 hr | | 2 bln | | |
| | 0 | 6 | 0 | | 0 | 6 | |
| TOTAL | | | | | | | 12 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat digambarkan bahwa penerima remisi umum untuk narapidana narkotika pada tahun 2015 sebanyak 6 orang, dengan uraian 4 orang mendapatkan remisi umum sebesar 2 bulan, kemudian 2 orang lainnya mendapatkan remisi umum sebesar 3 bulan. Sama dengan jumlah penerima remisi umum, yaitu sebanyak 6 orang narapidana narkotika pada tahun 2015 mendapatkan remisi khusus sebesar 1 bulan. Sehingga jumlah total narapidana narkotika yang menerima remisi pada tahun 2015 di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung adalah sebanyak 12 orang narapidana narkotika.

Jika dilihat dari jumlah total penerima remisi pada tahun 2015, maka angka ini tentunya mengalami penurunan dari jumlah penerima remisi pada tahun 2014 khususnya narapidana narkotika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 pelaksanaan PP No. 99 tahun 2012 sudah sangat

efektif, karena jumlah penerima remisi relatif kecil yaitu hanya 12 orang dari 70 narapidana narkoba.

Tabel 10
Jumlah Narapidana Narkoba yang Menerima Remisi Tahun 2016 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

| Jumlah Narapidana Narkotika | Besarnya Remisi Umum | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | |
| 104 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| | Besarnya Remisi Khusus | | | | | | Jumlah |
| | 15 hr | 1 bln | 1 bln 15 hr | | 2 bln | | |
| | 2 | 6 | 2 | | | | 10 |
| TOTAL | | | | | | | 25 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Dari data di atas, dijelaskan bahwa pada tahun 2016 narapidana narkoba yang mendapatkan remisi umum sebanyak 15 orang dengan besar remisi yang didapatkan sebesar 1 bulan. Kemudian untuk remisi khusus diberikan kepada 10 narapidana narkoba, dengan rincian 2 orang mendapatkan remisi khusus sebesar 15 hari, kemudian 6 orang menerima remisi khusus sebesar 1 bulan, dan sisanya 2 orang memperoleh remisi khusus sebesar 1 bulan 15 hari. Sehingga jumlah total penerima remisi pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 orang narapidana narkoba. Walaupun jumlah total penerima remisi pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan penerima remisi pada tahun 2015, akan tetapi hal tersebut bukan berarti pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak terlaksana. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana narkoba pada tahun ini yang berjumlah 104 orang, maka dapat dikatakan

bahwa jumlah penerima remisi tergolong sedikit. Jadi, sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 disimpulkan bahwa, pemberian remisi pada tahun 2016 di Lapas Muaro Sijunjung dapat dikatakan telah ketat dilihat dari perbandingan jumlah penerima remisi yang hanya berjumlah 25 orang dari 104 narapidana narkotika.

Tabel 11
Jumlah Narapidana Narkotika yang Menerima Remisi Tahun 2017 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

| Jumlah Narapidana Narkotika | Besarnya Remisi Umum | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | |
| 105 | 9 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 36 |
| | Besarnya Remisi Khusus | | | | | | Jumlah |
| | 15 hr | 1 bln | 1 bln 15 hr | 2 bln | | | |
| | 11 | 2 | 6 | 2 | 21 | | |
| TOTAL | | | | | | | 57 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Berdasarkan data di atas, bahwa Lapas Muaro Sijunjung pada tahun 2017 memberikan remisi umum kepada 36 orang narapidana narkotika, dengan angka terbesar diperoleh oleh narapidana penerima remisi sebesar 3 bulan yakni sebanyak 18 orang, disusul oleh narapidana penerima remisi sebesar 1 bulan sebanyak 9 bulan, 3 orang menerima remisi umum sebesar 4 bulan, dan sebanyak 2 orang narapidana narkotika mendapatkan remisi umum sebesar 5 bulan. Dari 36 orang narapidana narkotika yang menerima remisi umum, 2 (dua) diantaranya langsung dinyatakan bebas, sedangkan sisanya masih harus menjalani sisa masa pidananya. Selanjutnya untuk remisi khusus, pada tahun 2017 mengalami kenaikan

dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 21 orang yang sebagian besar menerima remisi sebesar 15 hari. Kemudian dari data-data tersebut didapatkan jumlah total penerima remisi pada tahun 2017 adalah sebanyak 57 orang. Dengan jumlah penerima remisi sebanyak 57 orang, jika dibandingkan dengan jumlah narapidana narkoba pada tahun 2017 yaitu sebanyak 105 orang, maka dapat dikatakan bahwa jumlah penerima remisi terbilang banyak yakni setengah dari jumlah narapidana yang ada. Jadi, dapat disimpulkan pada tahun 2017 tujuan pengetatan yang diatur dalam PP 99 tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana harusnya.

Tabel 12

**Jumlah Narapidana Narkoba yang Menerima Remisi Tahun
2018 Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung**

| Jumlah Narapidana Narkotika | Besarnya Remisi Umum | | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| | 1 bln | 2 bln | 3 bln | 4 bln | 5 bln | 6 bln | |
| 110 | 5 | 9 | 3 | 18 | 3 | 1 | 39 |
| | Besarnya Remisi Khusus | | | | | | Jumlah |
| | 15 hr | 1 bln | 1 bln 15 hr | | 2 bln | | |
| | 2 | 11 | 5 | | 3 | 21 | |
| TOTAL | | | | | | | 60 |

Sumber: Dokumen data Remisi Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung

Sesuai dengan data yang tertera dalam tabel diatas, didapatkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penerima remisi baik itu remisi umum maupun remisi khusus mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 60 orang. Dari jumlah total tersebut dapat dirinci sebanyak 39 orang mendapatkan remisi umum, dan sebagian besar menerima remisi umum

sebesar 4 bulan. Dari 39 orang yang mendapatkan remisi umum, 1 diantaranya langsung dinyatakan bebas, sedangkan sisanya masih harus berada dalam Lapas untuk melanjutkan masa pidananya. Selanjutnya untuk penerima remisi khusus dengan jumlah sebanyak 21 orang. Angka ini sama dengan perolehan pada tahun sebelumnya, ada pun rinciannya yaitu jumlah terbanyak adalah 11 orang penerima remisi khusus sebesar 1 bulan. Dilihat dari jumlah total yaitu sebanyak 60 orang pada tahun 2018 menerima remisi. Sama dengan tahun sebelumnya, bahwa pada tahun 2018 ini pengetatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari data tersebut dapat diamati bahwa pemberian remisi di Lapas Muaro Sijunjung mengalami fluktuasi atau ketidak tetapan khususnya bagi narapidana narkoba. Pada tabel jumlah penerima remisi khususnya narapidana narkoba dapat kita lihat bahwa jumlahnya setiap tahun selalu berubah. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 jumlah penerima remisi umum mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2016 jumlah penerima mengalami kenaikan sebanyak 25 orang. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penerima remisi bagi narapidana narkoba kembali mengalami kenaikan yaitu dari 25 orang menjadi 57 orang. Sedangkan pada tahun 2018, angka penerima hanya bertambah beberapa orang yaitu menjadi 39 orang untuk remisi umum dan 21 orang untuk remisi khusus.

Oleh karena jumlah penerima remisi khususnya narapidana narkoba mengalami fluktuasi atau ketidak tetapan, hal itu tentunya dipengaruhi oleh syarat atau tolak ukur petugas dalam pemberian remisi kepada narapidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

Kepala Sub Bagian Registrasi Lapas Muaro Sijunjung bahwa dasar pertimbangan pemberian remisi adalah :

“dasar pertimbangan dalam pemberian remisi bagi narapidana narkotika tentunya berdasar pada peraturan perundang-undangan yaitu pasal tentang hak-hak narapidana dan yang berkaitan dengan remisi seperti narapidana narkotika telah menjalani hukuman selama 6 bulan, berkelakuan baik artinya tidak berbuat keributan, perkelahian, kerusakan, dan tidak pernah melanggar aturan yang dibuat oleh Lapas.”¹⁹

Dari keterangan yang diberikan oleh Bu Yuslinar tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan petugas dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika adalah:

1. Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 yang menyebutkan “setiap narapidana dan anak pidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan hak-hak tertentu, salah satunya pengurangan masa pidana”.²⁰
2. Keputusan Presiden tentang Remisi No. 174 tahun 1999 yang menyatakan “pengurangan masa pidana (remisi) merupakan hak dari setiap narapidana, tidak terkecuali narapidana narkotika”.²¹
3. Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, tepatnya dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 peraturan tersebut.

Dalam hal pertimbangan pemberian remisi, Lapas Muaro Sijunjung menerapkan aturan diantaranya adalah setiap narapidana nakotika

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuslinar, selaku Kepala Sub Seki Registrasi, 29 September 2018

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Paal 14 huruf (i).

²¹ Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

diharuskan untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak terdaftar dalam buku register (f). Selain itu, narapidana narkotika juga diharuskan untuk mendapatkan binaan dari segi psikologis yang berguna untuk mengembangkan pola pikir dalam terjun ke masyarakat.²²

Dengan diberikannya hak pengurangan masa pidana kepada narapidana narkotika, dengan berdasarkan pada syarat berkelakuan baik, maka penulis menganggap bahwa itu merupakan suatu faktor yang memotivasi narapidana dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Dasar berkelakuan baik itu sangat efektif untuk diterapkan khusus bagi narapidana tindak pidana narkotika, apalagi di Lapas Muaro Sijunjung, yang jumlah narapidana Tindak Pidana Narkotika paling banyak sebagai Pengedar atau Bandar.

Untuk menilai apakah seseorang narapidana tindak pidana narkotika itu dapat mengubah diri atau masih sama dengan sebelum dipidana, tidaklah cukup dengan perbuatan baik saja. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika ini juga berkaitan dengan masalah psikologis, bukan masalah perilaku menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga peran pembinaan psikologis juga perlu diterapkan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung menerapkan pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga narapidana khususnya narapidana narkotika mendapatkan pembinaan secara fisik maupun batin.

²² Hasil wawancara dengan Ibu Yuslinar, S.H, Kepala Subsidi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, 2 Oktober 2018.

Pemberian remisi di Lapas Muaro Sijunjung juga mempertimbangkan over kapasitas yang dialami oleh Lapas. Sesuai dengan data yang telah penulis terangkan sebelumnya bahwa Lapas Muaro Sijunjung yang dihuni oleh 290 narapidana, sedangkan kapasitas Lapas hanyalah 150 yang artinya Lapas mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 140 orang. Dengan kelebihan kapasitas ini, tentunya akan membawa banyak permasalahan seperti biaya makan, kenyamanan narapidana, dan tidak efektifnya program pembinaan untuk narapidana. Bahkan karena kelebihan kapasitas di Lapas Muaro Sijunjung, pada tahun lalu tepatnya 17 September 2017, sebanyak 12 narapidana berhasil kabur dan melukai 1 petugas.²³ Masalah kelebihan kapasitas ini bisa diselesaikan dengan cara pemberian remisi bagi narapidana. Apalagi pada narapidana narkoba, yang jumlah narapidannya tergolong banyak. Dengan pemberian pengurangan masa pidana, maka narapidana yang bersangkutan akan cepat bebas dan mengurangi jumlah warga binaan di dalam Lapas.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan petugas Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ada beberapa pertimbangan yang tidak tertulis di dalam perundang-perundangan seperti kelebihan kapasitas, menurut penulis pemberian remisi merupakan langkah yang cukup efektif dilakukan untuk mengurangi kelebihan jumlah warga binaan di Lapas Muaro Sijunjung.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuslinar S.H, selaku Kepala Subsi Registrasi dan Bimbingan Kerja Kemasyarakatan, 2 Oktober 2018.

Kemudian berkaitan dengan pengetatan syarat yang diberikan untuk narapidana narkoba, menurut penulis pengaturan di Peraturan Pemerintah No. 99 / 2012 belum dapat dikatakan ketat di Lapas Muaro Sijunjung, karena dilihat dari data 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan 2018 masih banyaknya jumlah narapidana yang mendapatkan remisi. Terlebih persyaratan tambahan bekerjasama ini tidak ada implementasi sama sekali di Lapas Muaro Sijunjung.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyimpulkan:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung tidak memiliki kriteria khusus dalam menerapkan syarat tambahan untuk narapidana narkoba yaitu persyaratan bekerjasama membongkar kasus yang dilakukan. Kemudian implementasi dari syarat tersebut belum pernah dilaksanakan. Jadi, persyaratan bekerjasama sebagai syarat tambahan belum efektif dalam hal implementasi di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hak memperoleh remisi di Lapas Muaro Sijunjung diantaranya adalah menerapkan aturan bahwa narapidana narkoba diharuskan berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di Lapas, tidak terdaftar dalam buku regiter (F). Selain itu narapidana narkoba juga diharuskan untuk mendapatkan binaan dari segi psikologi untuk membangun pola pikirnya setelah keluar dari pembinaan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung. Kemudian pegawai Lapas juga mempertimbangkan over kapasitas yang dialami oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung.

B Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan di Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung sebagai berikut:

1. Dalam hal kriteria bekerjasama bagi narapidana narkotika sebaiknya aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi dalam hal implementasi dari syarat tersebut, sehingga fungsi dan tujuan diberikan syarat tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, bukan hanya dijadikan syarat untuk memperketat saja.
2. Dari segi dasar pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana narkotika harus lebih diperhatikan lagi apakah narapidana yang bersangkutan benar-benar telah sadar akan kesalahannya dan tidak akan terjebak dengan kemelut narkoba lagi. Karena dilihat dari beberapa kasus, masih banyak narapidana narkotika yang telah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, dalam beberapa waktu mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Yesmil Anwar. 2008. **Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)**. Jakarta: PT. Grasindo.
- R Abdoel, Djamali. 2010. **Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi**. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Erdianto, Efendi. 2011. **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**. Bandung: Refika Aditama.
- Mukti ND, Fajar dan Yulianto Ahmad. 20s07. **Dualisme Penelitian Hukum**. Jakarta: Pensil Komunika.
- Andi, Hamzah. 1993. **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Amir, Ilyas. 2012. **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta: Ragkap Education Yogyakarta dan Pakup Indonesia.
- Chritine, Kansil dan C.S.T Kansil. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Pidana: Cetakan ke-1**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang. 1997. **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Citra Aduttya Bakti.
- Yulies Tiena, Masriani. 2013. **Pengantar Hukum Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwija, Prayitno. 2003. **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (ide dasar double track system dan implementasinya)**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidja, Priyatno. 2006. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**. Bandung: Rafika Aditama.

- Umar, Sai. 2009. **Pengantar Hukum Indonesia**. Malang: Setara Press.
- C.Djisman, Samosir. 2012. **Sekulumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan**. Nuansa Aula.
- Hari, Sasangka. 2003. **Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana**. Bandung: Maju Mundur.
- Sianturi, S.R. 2002. **Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, Sunarso. 2004. **Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiolog Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Natas George Bulu. 2013. **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (emb) Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Nega Kelas II B Kab. Tanah Toraja**. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Umi Enggarsasi & Atet Sumanto. **Pemberin Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**, Jurnal Perspektif, Volume CC No.2, 2015.

INTERNET

- Andi Saputra. 26 Februari 2016. **Indonesia Darurat Sabu dan Pabrik Sabu Terbesar Ketiga di Dunia**. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3151748/indonesia-darurat-narkoba-dan-jejak-pabrik-sabu-terbesar-ketiga-di-dunia/4> (diakses 29 Agustus 2018).
- Andry Haryanto. 17 Desember 2017. **BNN Gerebek Pabrik Narkotika didiskotik** Jakarta. Liputan 6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/3198668/bnn-gerebek-pabrik-narkoba-di-diskotek-jakarta-pemilik-diburu>. (diakses 29 Agustus 2018).
- Aritonang, Deytri Robekka, **Batasi Remisi dengan Undang-Undang**, <http://www.kompas.com>, diakses 20 Juli 2018.
- Deytri Robekka Aritonang, **batasi remisi dengan Undang-Undang** <http://www.kompas.com>, (20 Juli 2018).
- Ditjen PAS, **Sistem Database Pemasyarakatan (online)** <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> , diaksen 30 agustus 2018.
- Indra Akuntono. 4 Februari 2015. **Preiden Joko Widodo: Indonesia Gawat Darurat Narkoba**. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/10331931/Presiden.Jokowi.Inonesia.Gawat.Darurat.Narkoba> (diakses 29 Agustus 2018).

Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, **Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017**, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, 2017, hal 22.

Yandi Mohammad. 15 Juni 2018. **Remisi Lebaran untuk 80.430 Narapidana** <https://beritagar.id/artikel/berita/remisi-lebaran-untuk-80430-narapidana> (diakses 16 Oktober 2018).

Yoga Sukmana. 16 Agustus 2018. **HUT ke-73 RI, 102.976 Napi Dapat Remisi, 2.220 di Antaranya Bebas** <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/20304121/hut-ke-73-ri-102976-napi-dapat-remisi-2220-di-antaranya-bebas> (diakses 16 Oktober 2018).

SKRIPSI

A. Uhartini, **Pemenuhan Hak Memperoleh Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Rumah Tahanan Klas Ii B Watansoppeng Tahun 2011-2016)**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.

Novan Ramkhamad P, **Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam Pp Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Di Lapas Lowokwaru Malang)**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Taun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. 01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.

